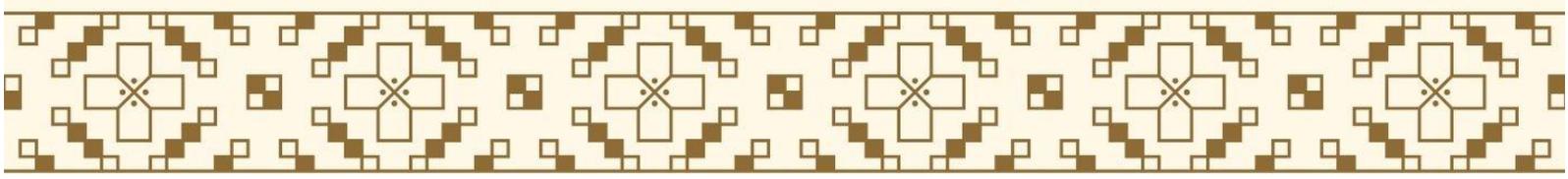




**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN**



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat) serta sebagai sarana evaluasi ke dalam atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 merupakan Tahun kedua dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026, kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai, tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024 ini, disampaikan dengan harapan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dapat lebih ditingkatkan dimasa mendatang, baik melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Manokwari, 14 Februari 2025


Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat,
dr. ALWAN RIMOSAN, Sp.B.FINACS
Pembina Tk. I
NIP.19691027 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan	3
D. Analisis Aspek Strategis	6
E. Sistematika Laporan.....	9
BAB II PERENCANAAN.....	12
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Pengukuran Kinerja.....	24
B. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024	25
C. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2024	31
D. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	32
E. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD.....	50
F. Realisasi Anggaran.....	52
G. Dokumentasi Kegiatan.....	58
BAB IV PENUTUP	67
LAMPIRAN	71
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
B. Formulir E.55 Evaluasi Hasil Terhadap Renja OPD Lingkup Provinsi Tahun 2024	
C. SK IKU 2023-2026	
D. Pohon Kinerja	
E. Cascading dan Keselarasan	
F. Crosscutting	
G. Rencana Aksi	
H. Prestasi / penghargaan yang diperoleh	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Posisi Pegawai Per 31 Desember 2024, menurut Golongan dan Jabatan.....	7
Tabel I.2. APBD Dinas Kesehatan Menurut Jenis Belanja.....	9
Tabel II.1. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2024	15
Tabel II.2. Indikator Kinerja Utama.....	21
Tabel III.1. Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024.....	25
Tabel III.2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan.....	32
Tabel III.3. Target dan Capaian RENSTRA.....	33
Tabel III.4. Indikator dan Target Persentase Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Barat Berdasarkan Renstra Dinkes 2023 – 2026.....	33
Tabel III.5. Rasio tenaga kesehatan per 1000 penduduk.....	39
Tabel III.6. Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai Indikator/status Indikator	43
Tabel III.7. Indikator dan Target Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Germas Berdasarkan Renstra Dinkes 2023 - 2026.....	44
Tabel III.8. Indikator dan Target Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas Berdasarkan RPJMN 2020-2024.....	44
Tabel III.9. Persentase Rekapitulasi Angka Stunting di Papua Barat dan target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	45
Tabel III.10. Prevalensi Stunting Papua Barat Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) 2022 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.....	46
Tabel III.11. Indikator dan Target Prevalensi Stunting Pada RPJMN Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024.....	46
Tabel III.12. Persentase Balita Gizi Buruk (wasting) di Papua Barat Tahun 2024 dan Indikator dan Target sesuai Renstra Tahun 2024.....	48
Tabel III.13. Prevalensi Balita wasting berdasarkan SKI Tahun 2023	48
Tabel III.14. Target Indikator dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024	50
Tabel III.15. Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1. Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2024 dan Target Angka Harapan Hidup Berdasarkan Renstra/RPD Tahun 2023-2026.....	33
Grafik III.2. Angka Harapan Hidup Kabupaten di Provinsi Papua Barat.....	34
Grafik III.3. Persentase Kecamatan minimal 1 Puskesmas Tahun 2022-2024.....	36
Grafik III.4. Persentase Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas	36
Grafik III. 5. Rasio Puskesmas Per Kecamatan di Indonesia Tahun 2023.....	38
Grafik III.6. Jenis dan Jumlah tenaga Kesehatan Papua Barat Tahun.....	39
Grafik III.7. Persentase Ketersediaan 40 Item Indikator Obat Esensial di Puskesmas	42
Grafik III.8. Prevalensi Stunting Kabupaten di Papua Barat Berdasarkan Data Entry Elektronik Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Juni 2024	45
Grafik III.9. Prevalensi Wasting Berdasarkan Data Entry Elektronik Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Tahun 2024.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan	40
Gambar III.2. Pelayanan Kesehatan Bergerak	58
Gambar III.3. Sosialisasi Stunting, PHBS untuk anak Sekolah dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan dan Bencana.	60
Gambar III.4. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	61
Gambar III.5. Kegiatan Deteksi Dini Malaria, TB, dan HIV/AIDS	63
Gambar III.6. Kegiatan-Kegiatan yang mendukung Upaya Penurunan Prevalensi Stunting	64
Gambar III.7. Penyediaan Ruang Cathlab RSUD Provinsi Papua Barat	65
Gambar III.8. Pembangunan Gedung KJSU Tahap II	65





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

BAB-I PENDAHULUAN

UKBM

Kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan di Kabupaten Pegunungan Arfak dengan melakukan pelayanan Kesehatan Gratis dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat/Anak Usia Sekolah dengan Sasaran Orang Asli Papua.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Asas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja kementerian, lembaga, pemerintahan diberbagai tingkatan dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya negara, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Penyusunan Laporan kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat berpedoman pada peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program, kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu Lembaga.

B. Landasan Hukum

1. Undang – undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Meneteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan lembaga teknis

daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Struktur Dinas Kesehatan Papua Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, Terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program Informasi Dan Humas;
 - 2) Subbagian Keuangan & Pengelolaan Aset
 - 3) Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Keluarga & Gizi
 - 2) Seksi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit (P2P), terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans & Imunisasi
 - 2) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
 - 3) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi pelayanan Kesehatan Tradisional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kefarmasian
 - 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Alat Rumah Tangga
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Barat telah dibentuk UPTD-IFP yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD-IFP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD-IFP menyelenggarakan fungsi :

- 1) perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemantauan dan evaluasi Sediaan Farmasi , BMHP dan perbekalan kesehatan yang diperlukan oleh pelayanan kesehatan;
- 2) pengelolaan dan pendistribusian Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
- 3) penyusunan analisis kebutuhan, pencatatan dan pelaporan persediaan dan Mutasi Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
- 4) pengamatan mutu/kualitas Persediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- 5) monitoring dan evaluasi penggunaan Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan serta melakukan pembinaan pada unit pelayanan kesehatan;
- 6) penyusunan standar dan prosedur pengelolaan Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD-IFP dibantu oleh:

- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Analisis, Penerimaan, Distribusi dan Pengamanan;
- 3) Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Penyiapan; dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis umum pemerintah daerah serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi :

- 1) Membantu pengelolaan pembangunan kesehatan yang lebih baik dan keberlanjutan;
- 2) Menghasilkan rencana dan pembangunan kesehatan yang terarah kepada memenuhi hak masyarakat;
- 3) Memecahkan isu-isu strategis kesehatan, mendorong terwujudnya komitmen, kesepakatan dan kerja sama antara instansi masing-masing dan dengan masyarakat;
- 4) Mengkomunikasikan dan memasarkan eksistensi kesehatan (peningkatkan kesadaran);
- 5) Penyediaan pelayanan kesehatan lebih baik berdasarkan data yang akurat dan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyampaian pelayanan;
- 6) Pengelolaan keuangan lebih baik, terbuka dan akuntabel.

D. Analisis Aspek Strategis

Aspek Strategis adalah Aspek yang mendukung dan merupakan sumberdaya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Papua Barat, Aspek – aspek tersebut antara lain:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2024 sebanyak 86 Orang, berkurang dibanding dengan tahun 2023 (Sebanyak 88 Orang), 2 orang telah memasuki masa purna Bakti, sebagaimana dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel I.1. Posisi Pegawai Per 31 Desember 2024, menurut Golongan dan Jabatan

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Mutasi		Per 31 Desember 2024	
			(+)	(-)	Dinas	RSUD
1	2	3	4	5	6	7
A	STRUKTURAL					
1	Eselon II	0			1	
2	Eselon III	3			6	
3	Eselon IV	11			18	
	<i>Sub Jumlah</i>					
B	FUNGSIONAL	40			-	
C	STAF	40			54	
D	PPPK	8			7	
	JUMLAH	88			86	
	TOTAL	88			86	

Sumber : Sub. bagian Hukum, Umum, dan Kepegawaian, Dinkes Papua Barat

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Papua Barat memiliki sarana/ Prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Operasional Dinas Kesehatan, sarana dan prasaran tersebut berupa Gedung, Gudang, Mobil (Mobil Operasional Ambulance). Kegiatan Operasional Dinas kesehatan Papua Barat dilaksanakan di :

- 1) Kantor Utama/ Gedung Induk terletak di Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat, Jalan Brigjen (Purn) Abraham O. Ataruri, Arfai, Manokwari.
- 2) UPTD - IFP terletak di Jalan Brigjen Abraham O. Ataruri, Arfai, Manokwari.
- 3) RSUD Provinsi Papua Barat terletak di Kompleks Irman Jaya, Jalan Angkasa Mulyono, Amban, manokwari.

Sarana Penunjang Kegiatan Pelayanan yang dimiliki Oleh Dinas Kesehatan Papua Barat antara lain :

- 1) 3 Buah Ambulance;
- 2) 15 Unit Mobil Dinas/ Operasional
- 3) 42 Unit Motor/ Kendaraan Operasional
- 4) 77 Unit Laptop
- 5) 30 Unit Personal Computer/ PC

3. Aspek Pembiayaan Kesehatan.

Berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat, sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun 2024. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 102.292.006.267,00 (Seratus Dua Milyar Dua ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau turun sebesar 49% dari Anggaran Tahun 2023 yang sebesar Rp. 199.985.977.762,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Dengan dana tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kegiatan lainnya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Program/kegiatan yang telah direncanakan memerlukan koordinasi antara bidang/bagian yang memadai sehingga pencapaian sasaran program atau kegiatan yang bersangkutan dapat lebih efektif.

Tabel I.2. APBD Dinas Kesehatan Menurut Jenis Belanja

NO	URAIAN	Th. 2023	Th.2024
		DINKES (Rp.)	DINKES (Rp.)
1	Anggaran	199.985.977.762	102.292.006.267
2	Belanja Tidak Langsung	18.735.372.733	36.929.926.048
	2.1 Belanja Pegawai	18.735.372.733	36.929.926.048
3	Belanja Langsung	181.250.605.029	65.362.080.219
	3.1 Belanja Pegawai	1.640.558.920	-
	3.2 Belanja Barang dan Jasa	75.882.539.674	44.718.777.946
	3.3 Belanja Modal	95.477.506.435	19.643.302.273
	3.4 Belanja Hibah	8.250.000.000	1.000.000.000

Sumber : SIPD RI

4. Aspek Permasalahan Kesehatan

Prioritas Masalah Kesehatan di Provinsi Papua Barat pada Tahun 2024 di Prioritaskan pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1 Angka Harapan Hidup
- 2 Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas
- 3 Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk
- 4 Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%
- 5 Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- 6 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita
- 7 Persentase Balita Gizi Buruk

E. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan
- D. Analisis Aspek Strategis
- E. Sistematika Laporan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Sasaran Kinerja
- C. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- D. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2024
- E. Analisis Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya
- F. Realisasi Anggaran
- G. Dokumentasi Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN –LAMPIRAN

- I. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- J. Formulir E.55 Evaluasi Hasil Terhadap Renja OPD Lingkup Provinsi Tahun 2024
- K. Pohon Kinerja
- L. Cascading dan Keselarasan
- M. Crosscutting
- N. Prestasi / penghargaan yang diperoleh



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

BAB-II PERENCANAAN

PKBM

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak merupakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan secara tim dalam rangka meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Tujuan utama pelayanan kesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable) dan bermutu (quality) untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.



BAB II

PERENCANAAN

Sebagai sebuah institusi pelayanan publik mempunyai rencana strategis 2023-2026 yang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, untuk daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2022, maka telah disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dan dokumen RPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan taktis strategis untuk menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis adalah suatu alat manajemen, yang merupakan proses berkelanjutan dan sistimatis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan manfaat sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi dan mengorganisasikan secara sistimatis untuk usaha-usahnya melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik.

Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan pengembangan lingkungan strategis baik lokal maupun nasional. Analisis terhadap lingkup organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam perhitungan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan / kendala (*threats*) yang ada.

Dari uraian singkat diatas, unsur – unsur utama yang perlu secara formal di definisikan dalam suatu rencana Strategis adalah Penjabaran Tujuan dan

Sasaran Strategis serta perumusan Strategis pencapaian tujuan atau sasaran berupa Program dan Kegiatan.

A. Rencana Strategis

Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan pernyataan tentang sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam periode 2023-2026. Tujuan dirumuskan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, yang menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Selain itu, tujuan tersebut juga dirumuskan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan Kesehatan yang ada di level Provinsi Papua Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memiliki tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, tujuan tersebut yakni :
“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan sosial” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Koordinasi Kebijakan Daerah;
2. Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Menurunkan Angka Stunting.

B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

1. Perjanjian Kinerja

Untuk mengukur capaian setiap sasaran Strategis maka telah ditetapkan 3 (Tiga) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada RENSTRA perubahan Dinas Kesehatan 2023-2026. Rumusan tersebut juga telah tertuang didalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Berdasarkan APBD Perubahan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Kesehatan Papua Barat mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 102.292.006.267,00 (Seratus Dua Milyar Dua ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan 5 Program, 20 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2024 dan melaporkannya dalam laporan kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan dan bentuk Komitmen yang dituangkan dalam rencana kinerja Tahunan yang merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun. Untuk mengetahui indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (Target) dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel II.1. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGI OPD SESUAI RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Lakip	%	Triwulan : Triwulan : Triwulan : 100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41,883,708,264						
							1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 64,629,422				
							1.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 29,629,422	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 35,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 38,799,912,192				
							1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 36,621,286,048	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 105	105
							1.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Rp 2,143,626,144	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 35,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 29,629,422				
							1.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 29,629,422	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 64,629,422				
							1.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 29,629,422	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 35,000,000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,183,918,885				
							1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp 71,400,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.2 Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 175,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Triwulan 1 : Triwulan 2 : 1 Triwulan 3 : Triwulan 4 :	1

								2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif	Rp 75,328,000								
								1.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp 75,328,000	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Triwulan 1	:				1
													Triwulan 2	:				
													Triwulan 3	:				
													Triwulan 4	:	1			
								3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Rp 700,000,000								
								1.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Rp 700,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	Triwulan 1	:				1
													Triwulan 2	:				
													Triwulan 3	:				
													Triwulan 4	:	1			
6	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin	Persentase Balita Gizi Buruk	%	Triwulan : Triwulan : Triwulan : Triwulan : 100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,066,100,639												
								1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Rp 2,066,100,639								
								1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 2,066,100,639	meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan	Dokumen	Triwulan 1	:				1
													Triwulan 2	:				
													Triwulan 3	:				
													Triwulan 4	:	1			



2. Indikator Kinerja Utama

Adalah Untuk mengukur capaian Indikator Pada RPD Papua Barat 2023-2026, untuk memudahkan disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bidang Kesehatan, seperti di tuangkan pada tabel berikut ini :

Tabel II.4. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
				2023	2024	2025	2026	
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	65.78	66.04	66.31	66.57	66.84	66.84
2	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	Persen	75.00%	75.50%	83.11%	91.32%	100%	100%
3	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	Per 1000 Penduduk	10.45 per 1000 penduduk	10.50 per 1000 penduduk	10.55 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk
4	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	Persen	78.33%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	42.85%	46.15%	61.54%	79.92%	100%	100%
6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	30%	26%	22%	18%	14%	14%
7	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	10.05%	8.5%	7.5%	7.2%	6.9%	6.9%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

BAB-III AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya Penurunan Prevalensi Stunting

Kegiatan Intervensi spesifik dan sensitif dalam Upaya penurunan Prevalensi Stunting di Provinsi Papua Barat dengan melibatkan Kabupaten dan Puskesmas.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dituangkan melalui evaluasi dan analisis kinerja atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Evaluasi kinerja bertujuan agar pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dapat diketahui sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Sedangkan analisis kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Analisis dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja (*Performance Gap*) yang terjadi, serta penyebab untuk mencari strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

A. Pengukuran Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan saran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sesuai dengan rencana strategi dalam **Penetapan Indikator Kinerja**. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat meliputi input, output dan outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah (Rp.xxx).

Indikator input lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan; waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan; serta sarana dan prasarana belum memadai. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitupula indikator outcome, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.

Penetapan indikator kinerja beserta target pencapaian indikator kinerja ini mulai dilaksanakan pada saat perumusan rencana strategi. Dalam menetapkan indikator sasaran strategis, digunakan indikator-indikator tertentu yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran.

B. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian sasaran kinerja organisasi pada Dinas Kesehatan Papua

Barat tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel III.1. Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2024) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
					K	Rp.	Rp.	K	Rp.	Rp.	
					6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Lakip									
1		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 64,629,422				Rp 64,629,422			Rp 64,623,000	
		1.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 29,629,422	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 29,629,422	1	Dokumen	Rp 29,629,000	100.00%
		1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 35,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp 35,000,000	1	Laporan	Rp 34,994,000	100.00%
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 38,799,912,192				Rp 38,799,912,192			Rp 32,901,686,319	
		1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 36,621,286,048	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	Orang/Bulan	Rp 36,621,286,048	360	Orang/Bulan	Rp 31,079,816,499	100.00%
		1.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Rp 2,143,626,144	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	Rp 2,143,626,144	1	Dokumen	Rp 1,787,637,820	100.00%
		1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 35,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Rp 35,000,000	1	Laporan	Rp 34,232,000	100.00%
		3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 29,629,422				Rp 29,629,422			Rp 29,260,000	
		1.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 29,629,422	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Rp 29,629,422	1	Dokumen	Rp 29,260,000	100.00%
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 64,629,422				Rp 64,629,422			Rp 64,259,000	
		1.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 29,629,422	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp 29,629,422	1	Dokumen	Rp 29,325,000	100.00%
		1.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 35,000,000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	Rp 35,000,000	1	Dokumen	Rp 34,934,000	100.00%
		5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,183,918,885				Rp 1,183,918,885			Rp 1,183,514,292	
		1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp 71,400,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 71,400,000	1	Paket	Rp 71,400,000	100.00%
		1.2 Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 175,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 175,000,000	1	Paket	Rp 175,000,000	100.00%

		1.3	penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Rp 75,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 75,000,000	1	Paket	Rp 75,000,000	100.00%
		1.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 110,292,885	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Rp 110,292,885	1	Laporan	Rp 110,266,333	100.00%
		1.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 752,226,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Rp 752,226,000	1	Laporan	Rp 751,847,959	100.00%
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 860,829,249				Rp 860,829,249			Rp 857,724,941	
		1.1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 766,837,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp 766,837,400	1	Laporan	Rp 763,734,941	100.00%
		1.2	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Rp 93,991,849	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 93,991,849	1	Laporan	Rp 93,990,000	100.00%
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 880,159,672				Rp 880,159,672			Rp 878,389,771	
		1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 349,906,200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21	Unit	Rp 349,906,200	21	Unit	Rp 348,185,391	100.00%
		1.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 169,930,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	191	Unit	Rp 169,930,000	191	Unit	Rp 169,885,000	100.00%
		1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 360,323,472	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59	Unit	Rp 360,323,472	59	Unit	Rp 360,319,380	100.00%
2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata		Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	Rp 47,252,841,745				Rp 47,252,841,745			Rp 32,364,960,857	
		1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 25,706,944,923				Rp 25,706,944,923			Rp 14,409,094,310	
		1.1	Pengembangan Rumah Sakit	Rp 16,991,456,923	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	Unit	Rp 16,991,456,923	1	Unit	Rp 6,966,882,000	100.00%
		1.2	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Rp 500,000,000	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	3	Layanan	Rp 500,000,000	3	Layanan	Rp 497,966,498	100.00%

	1,3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 1.807.450.000	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Unit	Rp 1.807.450.000	1	Unit	Rp 1.802.668.000	100,00%
	1,4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 2.500.000.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6	Unit	Rp 2.500.000.000	3	Unit	Rp 2.105.070.000	100,00%
	1,5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp 2.218.148.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1	Paket	Rp 2.218.148.000	1	Paket	Rp 1.347.344.512	100,00%
	1,6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp 1.689.890.000	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1	Dokumen	Rp 1.689.890.000	1	Dokumen	Rp 1.689.163.300	100,00%
	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 19.709.403.496				Rp 19.709.403.496			Rp 16.219.234.183	
	1,1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Rp 2.500.000.000	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1000	Orang	Rp 2.500.000.000	1000	Orang	Rp 1.147.090.243	93,33%
	1,2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 1.780.838.250	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000	Orang	Rp 1.780.838.250	85718	Orang	Rp 1.157.397.600	97,14%
	1,3	pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu dan anak	Rp 713.550.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	Dokumen	Rp 713.550.000	1	Dokumen	Rp 663.036.860	100,00%
	1,4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	Rp 75.328.000	1	Dokumen	Rp 74.040.000	100,00%
	1,5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	Dokumen	Rp 75.328.000	1	Dokumen	Rp 75.264.000	100,00%
	1,6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 116.078.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	Rp 116.078.000	1	Dokumen	Rp 107.937.300	100,00%
	1,7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 99.237.916	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	Rp 99.237.916	1	Dokumen	Rp 98.313.316	100,00%

1.8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 250,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	Rp 250,000,000	1	Dokumen	Rp 246,468,000	100.00%
1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp 173,848,463	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	Rp 173,848,463	1	Dokumen	Rp 168,852,800	100.00%
1.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 1,197,789,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1	Dokumen	Rp 1,197,789,000	1	Dokumen	Rp 1,019,174,438	100.00%
1.11	pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	Rp 8,521,319,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	Rp 8,521,319,000	1	Dokumen	Rp 7,888,582,876	100.00%
1.12	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 614,630,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	Rp 614,630,000	1	Dokumen	Rp 364,803,600	100.00%
1.13	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Rp 384,112,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 384,112,000	1	Dokumen	Rp 339,183,510	100.00%
1.14	Pembinaan Pelaksanaan Upaya pelayanan Kesehatan	Rp 1,374,070,127	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp 1,374,070,127	1	Dokumen	Rp 1,343,734,300	100.00%
1.15	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Rp 150,656,000	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1	Dokumen	Rp 150,656,000	1	Dokumen	Rp 131,403,400	100.00%
1.16	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Rp 75,328,000	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 75,328,000	0	Dokumen	Rp -	0.00%
1.17	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp 65,015,000	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	Rp 65,015,000	1	Unit	Rp 64,015,000	100.00%
1.18	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Rp 339,379,740	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp 339,379,740	1	Dokumen	Rp 183,254,740	100.00%
1.19	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Rp 204,300,000	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	Paket	Rp 204,300,000	1	Paket	Rp 148,938,000	100.00%

		1.20	Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan	Rp 998,596,000	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	Dokumen	Rp 998,596,000	1	Dokumen	Rp 997,744,200	100.00%
	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Rp 563,441,337				Rp 563,441,337			Rp 548,302,762	
		1.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 563,441,337	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	Rp 563,441,337	1	Dokumen	Rp 548,302,762	100.00%
	4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Rp 384,608,463				Rp 384,608,463			Rp 335,353,063	
		1.1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Rp 146,533,200	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2	Unit	Rp 146,533,200	2	Unit	Rp 98,615,000	100.00%
		1.2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 238,075,263	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2	Unit	Rp 238,075,263	2	Unit	Rp 236,738,063	100.00%
	5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP		Rp 888,443,526				Rp 888,443,526			Rp 852,976,539	
		1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Rp 391,445,280	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp 391,445,280	1	Dokumen	Rp 377,190,000	100.00%
		1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Rp 238,562,846	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp 238,562,846	1	Dokumen	Rp 234,031,600	100.00%
		1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Rp 258,435,400	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp 258,435,400	1	Dokumen	Rp 241,754,939	100.00%
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata		Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	Rp 9,936,477,995				Rp 9,936,477,995			Rp 9,070,750,272	
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Rp 1,366,500,000				Rp 1,366,500,000			Rp 889,787,443	
		1.1	peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Rp 866,500,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	13	Orang	Rp 866,500,000	10	Orang	Rp 737,751,560	100.00%
		1.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 500,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	Rp 500,000,000	1	Dokumen	Rp 152,035,883	100.00%
	2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Rp 4,033,977,995				Rp 4,033,977,995			Rp 3,699,059,557	
		1.1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Rp 4,033,977,995	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	25	Orang	Rp 4,033,977,995	16	Orang	Rp 3,699,059,557	64.00%
	3	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN		Rp 4,536,000,000				Rp 4,536,000,000			Rp 4,481,903,272	
		1.1	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Rp 4,536,000,000	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	10000	Orang	Rp 4,536,000,000	10229	Orang	Rp 4,481,903,272	102.29%

4	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%		Rp 155,220,724				Rp 155,220,724			Rp 111,834,400	
		1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Rp 100,538,621				Rp 100,538,621			Rp 65,976,800	
		1.1	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang PAK	Rp 100,538,621	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	3	Sarana	Rp 100,538,621	1	Sarana	Rp 65,976,800	100.00%
		2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Rp 54,682,103				Rp 54,682,103			Rp 45,857,600	
		1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp 54,682,103	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1	Sarana	Rp 54,682,103	1	Sarana	Rp 45,857,600	100.00%
5	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		Rp 997,656,900				Rp 997,656,900			Rp 949,929,850	
		1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Rp 222,328,900				Rp 222,328,900			Rp 208,836,900	
		1.1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan, Penggalangan kemitraan, peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Provinsi	Rp 222,328,900	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas pemberdayaan masyarakat	1	Dokumen	Rp 222,328,900	1	Dokumen	Rp 208,836,900	100.00%
		2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Rp 75,328,000				Rp 75,328,000			Rp 74,433,750	
		1.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp 75,328,000	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	Rp 75,328,000	1	Dokumen	Rp 74,433,750	100.00%
		3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Rp 700,000,000				Rp 700,000,000			Rp 666,659,200	
1.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Rp 700,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	Dokumen	Rp 700,000,000	1	Dokumen	Rp 666,659,200	100.00%		
6	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin	Persentase Balita Gizi Buruk		Rp 2,066,100,639				Rp 2,066,100,639			Rp 1,702,716,400	
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP	Rp 2,066,100,639				Rp 2,066,100,639			Rp 1,702,716,400	
		1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 2,066,100,639	meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan	1	Dokumen	Rp 2,066,100,639	1	Dokumen	Rp 1,702,716,400	100.00%

C. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2024

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan MENPAN dan RB no : PER/ 09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi Indikator Keluaran (Output) dan hasil (Outcome).

Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akutabilitas kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Tabel III.2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	2024	
		Target	Realisasi
1	2	3	4
1	Angka Harapan Hidup	66,31 Tahun	68,47 Tahun
2	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	83.11%	79,07%
3	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	10,55 per 1000 penduduk	10,82 per 1000 penduduk
4	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	100%	70,83%
5	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	61.54%	42,85%
6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	22%	14,73 %
7	Persentase Balita Gizi Buruk	7.50%	10%

D. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan target dan capaian indikator Periode Tahun sebelumnya (Tahun 2023) terdapat kenaikan mayoritas capaian indikator kinerja utama dari Tahun 2023 yakni pada indikator Persentase Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas, Rasio tenaga kesehatan per 1000 penduduk. Namun juga ada indikator yang mengalami penurunan capaian, yakni pada indikator Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100% dan Persentase Balita Gizi Buruk, seperti ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel III.3. Target dan Capaian RENSTRA

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	2024	
		Target	Realisasi
1	2	3	4
1	Angka Harapan Hidup	66,31 Tahun	68,47 Tahun
2	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	83.11%	79,07%
3	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	10,55 per 1000 penduduk	10,82 per 1000 penduduk
4	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	100%	70,83%
5	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	61.54%	42,85%
6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	22%	14,73 %
7	Persentase Balita Gizi Buruk	7.50%	10%

1. Angka Harapan Hidup

Grafik III.1. Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2024 dan Target Angka Harapan Hidup Berdasarkan Renstra/RPD Tahun 2023-2026.

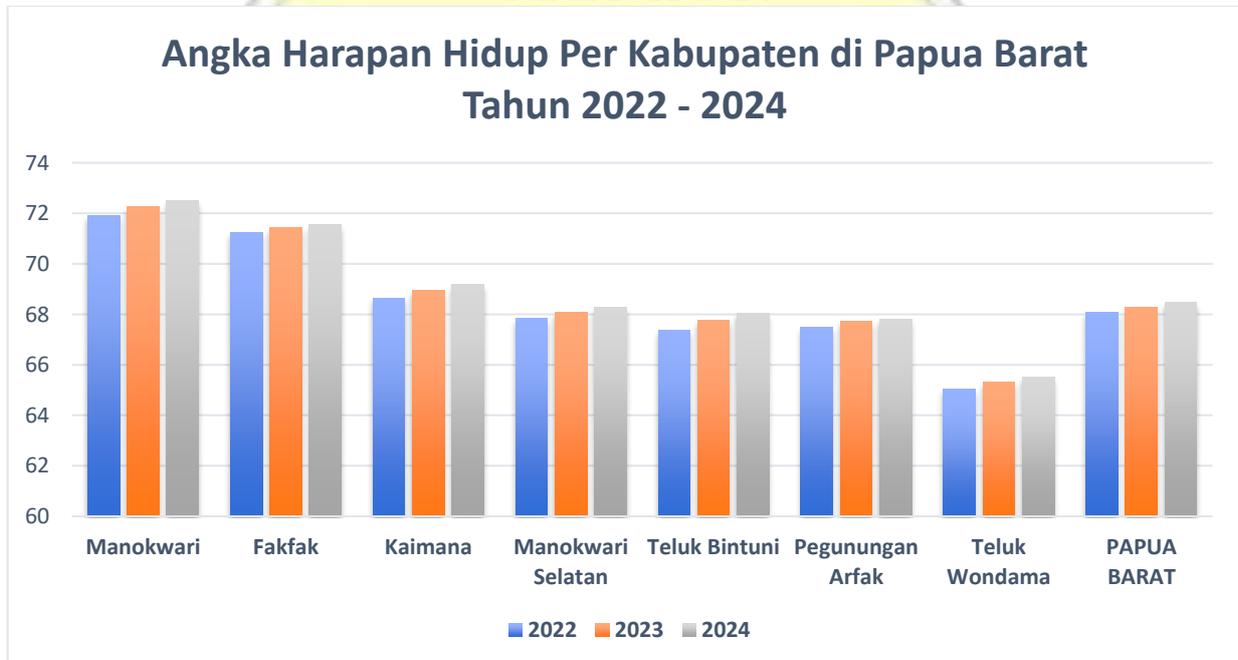
Tabel III.4. Indikator dan Target Persentase Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Barat Berdasarkan Renstra Dinkes 2023 - 2026

Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2022)	Target Kinerja Renstra (IKU RPD (2024)	Capaian (2024)
65,78 Tahun	66,31 Tahun	68,47 Tahun

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu disebut juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectancy at birth). Dari grafik Angka Harapan Hidup Papua Barat Tahun 2022-2024 diketahui bahwa terjadi peningkatan Angka Harapan Hidup sejak tahun 2022 (68,06

Tahun) sampai dengan 2024 (68,47 Tahun). Angka Harapan hidup Papua barat Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan target Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dengan capaian sebesar 68,47 Tahun dari Target 66,31 Tahun.

Grafik III.2. Angka Harapan Hidup Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Tahun 2024

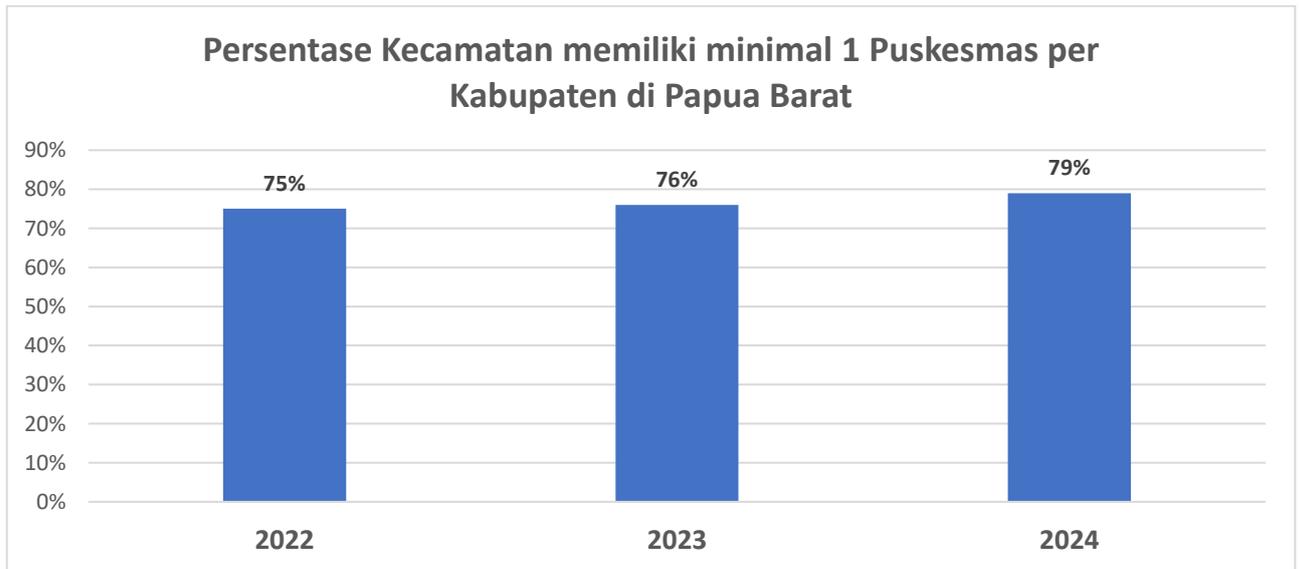
Dari gambar III.2. terlihat bahwa di Kabupaten di Provinsi Papua Barat dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 terjadi peningkatan Angka Harapan Hidup yang dapat mengindikasikan peningkatan status Kesehatan masyarakat. Kabupaten dengan Angka Harapan Hidup tertinggi pada Tahun 2024 adalah di Kabupaten Manokwari yakni 72,51 Tahun dan terendah di Kabupaten Teluk Wondama yakni 65,50 Tahun. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dari grafik capaian Angka Harapan Hidup baik di Provinsi maupun Kabupaten terlihat bahwa peningkatan Angka Harapan Hidup berbanding lurus dengan kualitas kesehatan masyarakat di Papua Barat. Dengan peningkatan Angka Harapan Hidup ini menggambarkan peningkatan derajat kesehatan penduduk yang juga

memperpanjang usia harapan hidupnya dan menandakan bahwa kualitas kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat Papua Barat telah mengalami perbaikan.

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup. Penjabaran terkait capaian-capaian indikator bidang kesehatan yang mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup di Papua Barat akan disajikan dalam analisa dan capaian target indikator baik pada Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Walaupun secara umum Indikator Angka Harapan Hidup Papua Barat meningkat secara bertahap, namun pada beberapa Kabupaten termasuk diantaranya Kabupaten Teluk Wondama memiliki capaian Angka Harapan Hidup paling rendah dibanding Kabupaten lainnya. Angka Harapan Hidup di kabupaten Teluk Wondama menggambarkan perlunya peningkatan kinerja program baik kesehatan maupun sosial ekonomi dalam mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakatnya. Angka Harapan Hidup yang masih cukup rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori dan program pemberantasan kemiskinan. Peningkatan angka harapan hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah di bidang kesehatan namun peningkatan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup itu sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi. Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah, perekonomian masyarakat, dan sebagainya.

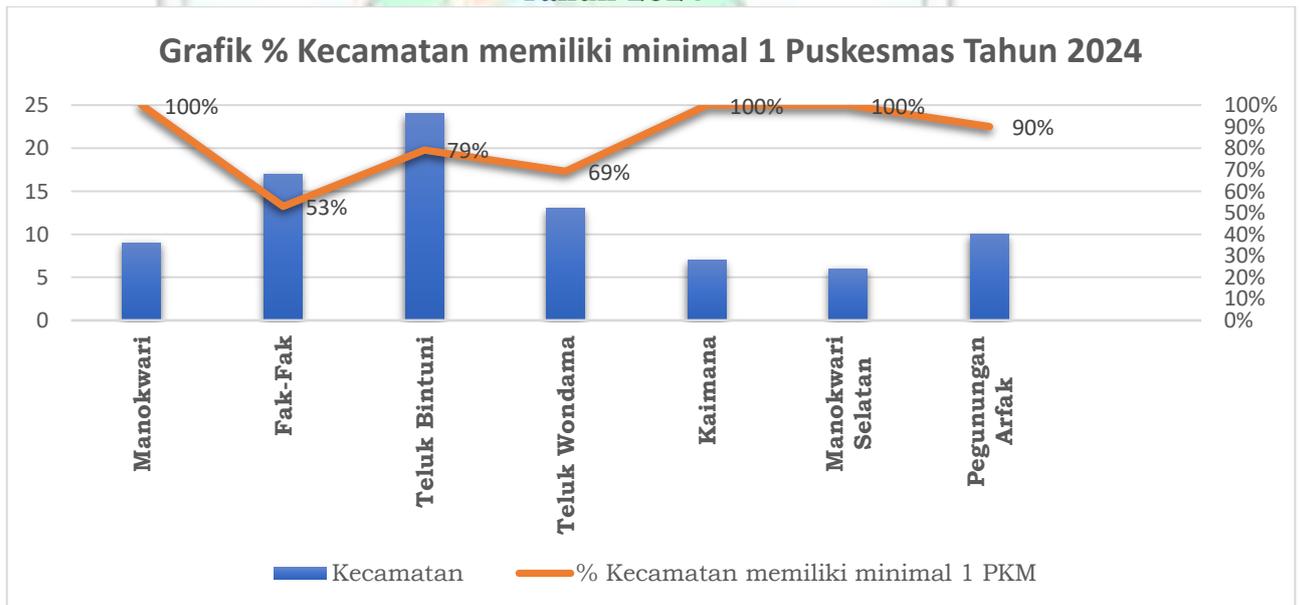
2. Persentase Kecamatan Memiliki minimal 1 Puskesmas

Grafik III.3. Persentase Kecamatan minimal 1 Puskesmas Tahun 2022-2024



Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan

Grafik III.4. Persentase Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas Tahun 2024



Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan

Dari data grafik di atas untuk Persentase kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas di Provinsi Papua Barat meningkat dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024, dimana di tahun 2024 adalah sebanyak 79% (68 dari total 86 Kecamatan telah memiliki minimal 1 Puskesmas), dimana Kabupaten dengan persentase tertinggi yakni Kabupaten Manokwari (100%),

Kabupaten Kaimana (100%) dan Kabupaten Manokwari Selatan (100%). Kabupaten dengan kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas dengan capaian terendah adalah di Kabupaten Fak-Fak (53%) dari total 17 Kecamatan. Masih rendahnya Persentase Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas menggambarkan masih belum maksimalnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan Kesehatan.

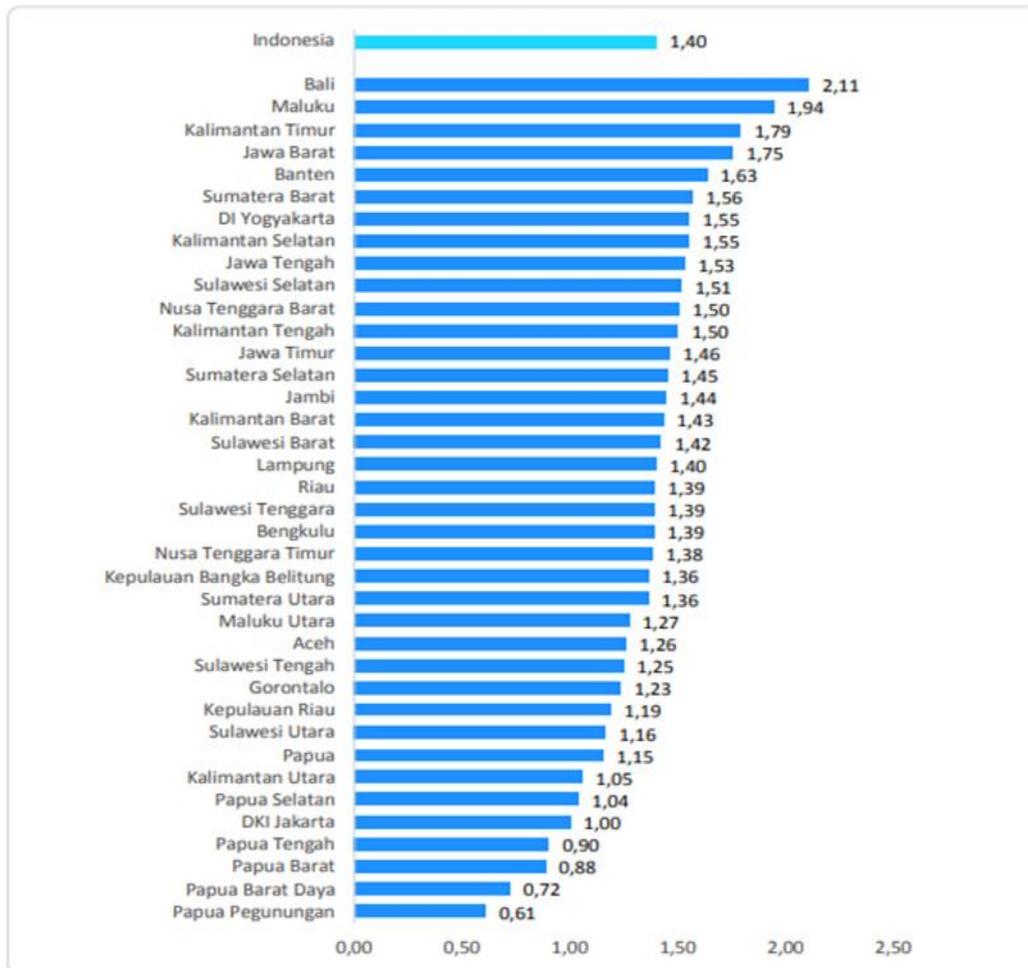
Kabupaten di Provinsi Papua Barat telah berupaya keras membangun gedung-gedung puskesmas baru sebagai salah satu upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan, sebagian gedung-gedung tersebut telah difungsikan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, namun masih ada (14 Puskesmas) yang belum diregistrasikan ke Kementerian Kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 tahun 2019. Fenomena tersebut sebagian besar terjadi karena kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan Puskesmas tersebut belum mencukupi jumlah dan jenisnya sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi yang ada.

Sebagai konsekuensinya, Puskesmas-Puskesmas baru tersebut, walaupun sudah mendapat izin operasional dari Kepala Daerah masing-masing, namun tidak mendapat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terpisah dari Puskesmas induknya, tidak dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga tidak mendapatkan kapitasi, tidak bisa mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi Puskesmas dan lain sebagainya. Hal ini sangat mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2020-2024, target Kemenkes adalah seluruh kecamatan di Indonesia memiliki minimal satu puskesmas. Rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan adalah 1:1. Jika dibandingkan dengan kondisi di Papua Barat, maka target Kemetrian Kesehatan ini belum tercapai. Harapan Dinas kesehatan Provinsi

Papua Barat kedepannya adalah semua kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas dan target akreditasi 100% untuk semua Puskesmas yang teregistrasi di Tahun 2025.

Grafik III. 5. Rasio Puskesmas Per Kecamatan di Indonesia Tahun 2023

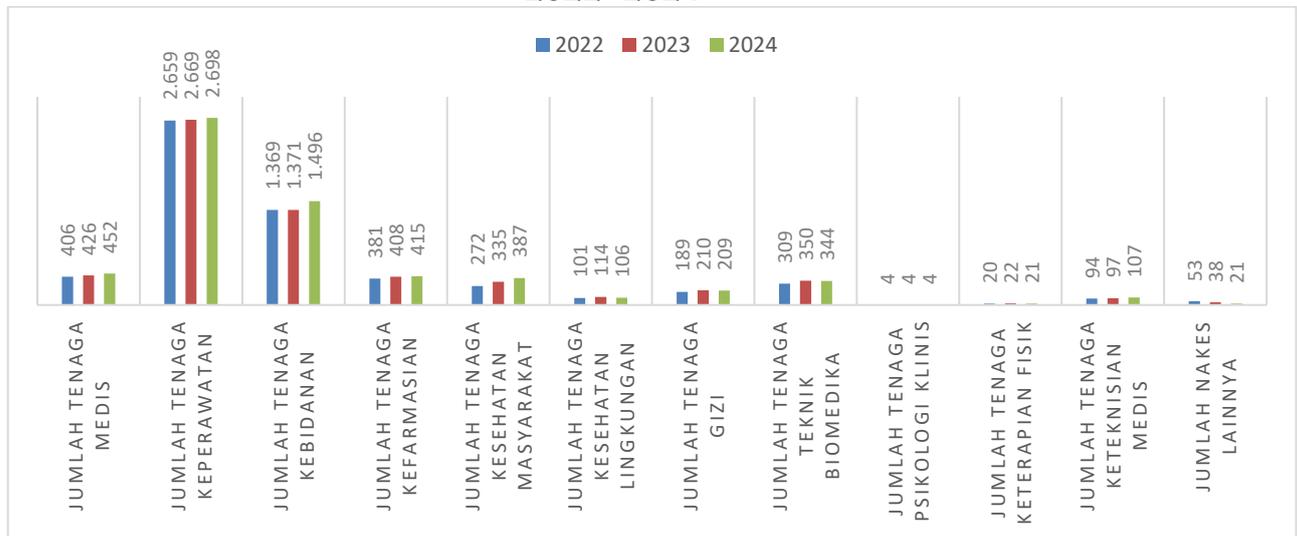


Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2024; Kementerian Dalam Negeri, 2023

Berdasarkan data Pusdatin Tahun 2023, terlihat bahwa Rasio puskesmas per kecamatan secara nasional adalah sebesar 1,4 namun untuk Papua Barat masih dibawah minimal 1 Puskesmas per Kecamatan (0,88). Upaya-upaya terus dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan verifikasi dan monitoring terhadap Puskesmas-Puskemas yang belum teregistrasi agar dapat teregistrasi, dan peningkatan dukungan sumber daya, pelatihan/workshop dan monitoring evaluasi yang berkelanjutan dalam mencapai target Akreditasi Puskesmas 100% di Tahun 2025.

3. Rasio tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk

Grafik III.6. Jenis dan Jumlah tenaga Kesehatan Papua Barat Tahun 2022 -2024



Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tabel III.5. Rasio tenaga kesehatan per 1000 penduduk

No.	Uraian	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter Umum	288	288	283
2	Jumlah Dokter Spesialis	83	83	87
4	Jumlah Tenaga Keperawatan	2,659	2,669	2,698
5	Jumlah Tenaga Kesehatan	5,857	6,044	6,260
6	Jumlah Penduduk	560,320	569,570	578,696
	Rasio Dokter Umum Per satuan Penduduk	0.51	0.51	0.49
	Rasio Dokter Spesialis Per satuan Penduduk	0.15	0.15	0.15
	Rasio Tenaga Keperawatan Per Satuan Penduduk	4.75	4.69	4.66
	Rasio Tenaga Kesehatan Per satuan Penduduk	10.45	10.61	10.82

Sumber : Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dari Grafik diatas terlihat bahwa pada Tahun 2024 terdapat kenaikan pada mayoritas jumlah dan rasio tenaga Kesehatan dibandingkan dengan Tahun 2022 dan 2023, namun belum semuanya mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan, misalnya rasio Dokter Umum per 1000 Penduduk menurut Target Rasio Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah 1 Per 1000 Penduduk, sementara Papua Barat sebesar 0,49 per 1000 Penduduk. Peningkatan jumlah tenaga Kesehatan pada jenis tenaga Kesehatan di Tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya adalah hal yang

Hasil tersebut pada gambar diperoleh dari periode pelaporan triwulan IV 2024, dimana jumlah Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% obat esensial (40 item obat indikator) sebanyak 72 Puskesmas dari 76 Puskesmas yang melapor. Hal tersebut menunjukkan persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial masih dibawah target 100% yaitu sebesar 70,83%.

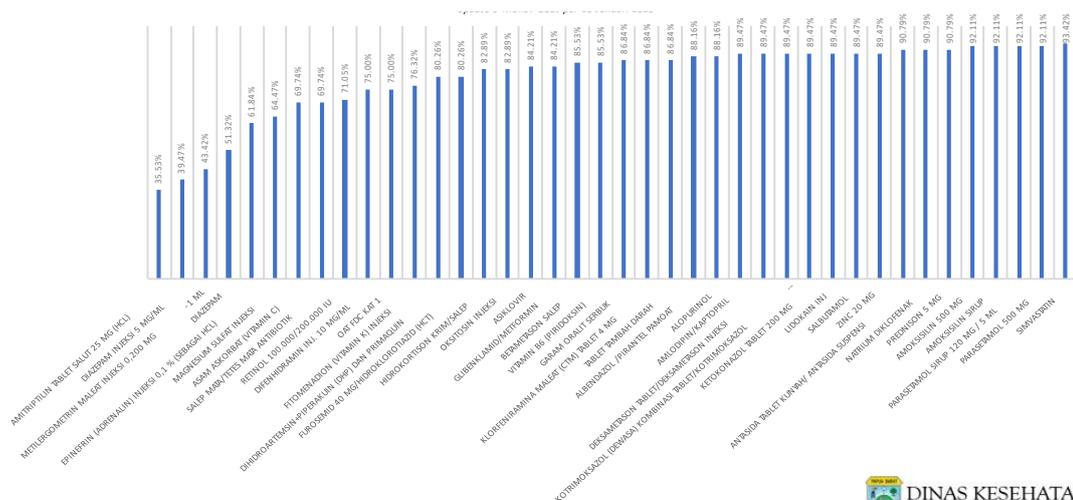
Capaian tertinggi persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial pada tahun 2024 yakni sebesar 100% dicapai oleh Kabupaten Teluk Wondama. Dan Kabupaten lainnya masih dibawah target nasional (96%) dan target provinsi (100%). Sementara capaian terendah adalah kabupaten Pegunungan Arfak yaitu 12,50%.

Proses pengadaan obat yang terhambat baik karena handling cost yang lebih besar yang disebabkan karena faktor geografis sehingga penyedia e-catalog enggan menyetujui pesanan terutama bila jumlah pesanan sedikit maupun rencana pengadaan yang tidak sesuai rencana kebutuhan obat yang memprioritaskan ketersediaan obat esensial, menjadi permasalahan hampir disemua kabupaten di Provinsi Papua Barat.

UPTD-IF Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sesuai Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 4 April 2024, merupakan bentuk keseriusan Dinas Kesehatan dalam peningkatan capaian kinerja terutama pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai (bmhp) dan perbekalan Kesehatan. UPTD Instalasi Farmasi merupakan unit yang sangat penting dengan tugas pokok melaksanakan penerimaan, pemeliharaan, pendistribusian, pencatatan, pendataan, pengawasan terkait ketersediaan dan penggunaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan.

Pemantauan Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dilakukan terhadap 40 item obat indikator yang dianggap esensial sesuai dengan formularium nasional dan harus/wajib tersedia di pelayanan kesehatan dasar, sebagaimana tabel berikut :

Grafik III.7. Persentase Ketersediaan 40 Item Indikator Obat Esensial di Puskesmas



DINAS KESEHATAN
SEKSI KEFARMASIAN

Sumber : Seksi Kefarmasian Dinkes Papua Barat

Jika dilihat dari ketersediaan masing-masing item obat esensial, item obat dengan ketersediaan tertinggi di Puskesmas tahun 2024 adalah Simvastatin (93,42%), sedangkan item obat dengan ketersediaan terendah adalah Amitriptylin tablet salut 25mg (HCl) (35,53%).

Indikator puskesmas dengan ketersediaan obat esensial belum mencapai target Renstra Provinsi Papua Barat tahun 2024 yakni 100%. Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target antara lain :

- Adanya pergantian tenaga pengelola laporan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas;
- Jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas dan kompetensi yang belum sesuai di Puskesmas;
- Adanya peralihan mekanisme pelaporan yang sebelumnya melapor secara manual menjadi melapor menggunakan aplikasi SELINA, dimana dalam aplikasi SELINA tidak terdapat kategori N/A untuk obat yang memang tidak digunakan di Puskesmas sehingga mempengaruhi tingkat ketersediaan.

Strategi dan upaya yang dilakukan dalam memperoleh keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial tahun 2024 antara lain :

- Melakukan monitoring, evaluasi terhadap capaian ketersediaan obat di sarana Puskesmas;

- b. Peningkatan SDM pengelola obat terhadap pelaporan Ketersediaan obat dan Vaksin;
- c. Penetapan pengelola laporan ketersediaan obat melalui SK Kepala 31 Puskesmas;
- d. Melakukan sosialisasi Aplikasi SELENA serta konsultasi teknis ke Pusat terkait kendala dalam pengisian pelaporan ketersediaan obat melalui Aplikasi SELENA.

5. Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Tabel III.6. Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai Indikator/status Indikator

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	MEMILIKI KEBIJAKAN GERMAS SESUAI DENGAN INPRES NO 1 TAHUN 2017 (MELAKSANAKAN 5 KLUSTER GERMAS) DAN ATAU KEBIJAKAN BERWAWASAN KESEHATAN	MELAKSANAKAN PENGERAKAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KLUSTER GERMAS MINIMAL 3 KALI SETAHUN, DENGAN MELIBATKAN LINTAS SEKTOR, PENDIDIKAN (SEKOLAH), UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) DAN ATAU MITRA POTENSIAL	Memiliki kegiatan skrining kesehatan di tempat kerja	Memiliki kegiatan pembinaan kesehatan tradisional	STATUS INDIKATOR
1	PAPUA BARAT	KAB. KAIMANA	TIDAK MEMILIKI	TIDAK MELAKSANAKAN	TIDAK MELAKSANAKAN	TIDAK MELAKSANAKAN	TIDAK MEMENUHI
2	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI	MEMILIKI (3 KEBIJAKAN)	MELAKSANAKAN (3 KEGIATAN)	TIDAK MELAKSANAKAN	MELAKSANAKAN (1 KEGIAT)	MEMENUHI
3	PAPUA BARAT	KAB. TELUK WONDAMA	MEMILIKI (1 KEBIJAKAN)	MELAKSANAKAN (3 KEGIATAN)	TIDAK MELAKSANAKAN	MELAKSANAKAN (6 KEGIAT)	MEMENUHI
4	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI SELATAN	TIDAK MEMILIKI	TIDAK MELAKSANAKAN	TIDAK MELAKSANAKAN	MELAKSANAKAN (1 KEGIAT)	TIDAK MEMENUHI
5	PAPUA BARAT	KAB. FAK FAK	MEMILIKI (1 KEBIJAKAN)	MELAKSANAKAN (4 KEGIATAN)	TIDAK MELAKSANAKAN	MELAKSANAKAN (1 KEGIAT)	MEMENUHI
6	PAPUA BARAT	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	TIDAK MEMILIKI	TIDAK MELAKSANAKAN	MELAKSANAKAN (1 KEGIATAN)	MELAKSANAKAN (1 KEGIAT)	TIDAK MEMENUHI
7	PAPUA BARAT	KAB. TELUK BINTUNI	TIDAK MEMILIKI	TIDAK MELAKSANAKAN	MELAKSANAKAN (12 KEGIATAN)	MELAKSANAKAN (12 KEGIAT)	TIDAK MEMENUHI

Sumber : Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Papua Barat

GERMAS merupakan berbagai upaya intervensi komprehensif dan holistik yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif guna menciptakan masyarakat yang mampu menerapkan perilaku hidup sehat yang berdampak pada kesehatan, produktivitas, lingkungan bersih, dan berkurangnya biaya berobat.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang GERMAS mengamanatkan setiap pihak terkait untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan GERMAS, melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Inpres ini juga mengamanatkan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kampanye GERMAS, meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR, meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, aktivitas fisik, dan meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas serta menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

Sejak dikeluarkannya Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 terdapat perubahan definisi operasional sebagai berikut : Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) bila memiliki regulasi terkait Germas, dan melaksanakan 2 dari 3 kegiatan berikut yakni Melaksanakan kampanye Germas tema prioritas, Memiliki kegiatan skrining kesehatan di tempat kerja dan Memiliki kegiatan pembinaan kesehatan tradisional.

Pada tahun 2024, capaian indikator persentase Kabupaten yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebesar 42,85% sama dengan capaian Tahun 2023. Kabupaten yang telah memenuhi indikator Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2024 adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Fak-Fak.

Tabel III.7. Indikator dan Target Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Germas Berdasarkan Renstra Dinkes 2023 - 2026

Target Kinerja Renstra (IKU) RPD 2024	Capaian (2024)
61.54%	42,85%

Tabel III.8. Indikator dan Target Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas Berdasarkan RPJMN 2020-2024

PP/KP/PRO-P/ PROYEK KL	INDIKATOR RPJMN 2020-2024	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan GERMAS	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	30	35	40	45	50

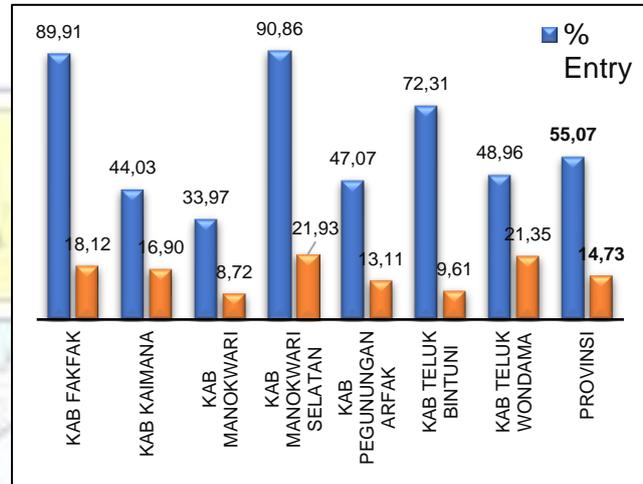
Capaian kinerja Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tahun 2024 jika dibandingkan dengan target indikator RPJMN Tahun 2024 sebesar 50% dan Renstra tahun 2024 sebesar 61,54%, maka capaian kinerja tahun 2024 belum tercapai. Tantangan dalam menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat hidup sehat adalah masih belum optimalnya komitmen dan dukungan dari Pemerintah daerah, dimana masih terdapat Kabupaten yang belum memiliki atau menerbitkan kebijakan Germas dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan. Selain itu, belum maksimalnya pemahaman petugas kesehatan terkait indikator-indikator yang harus dicapai dan dilaporkan untuk mendukung target pencapaian. Upaya dalam meningkatkan kinerja atau persentase kabupaten dalam menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat adalah dengan melaksanakan advokasi dan sosialisasi, monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Gerakan Masyarakat hidup sehat terutama pada Kabupaten dengan capaian kinerja rendah.

6. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita

Tabel III.9. Persentase Rekapitulasi Angka Stunting di Papua Barat dan target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Target Kinerja Renstra (IKU) RPD (2024)	Capaian (2024)
22%	14,73%

Grafik III.8. Prevalensi Stunting Kabupaten di Papua Barat Berdasarkan Data Entry Elektronik Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Juni 2024



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Papua Barat

Berdasarkan Data EPPGBM, Prevalensi Stunting Papua Barat berada diangka 14,73% dengan Data Entry 55,07%. Prevalensi stunting terendah adalah di Kabupaten Manokwari (8,72%) dan tertinggi di Kabupaten Manokwari Selatan (21,93%), namun dengan entrian tertinggi yakni 90,86%.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa capaian prevalensi stunting di Papua Barat sesuai data E-PPGBM lebih baik dibandingkan target Indikator Kinerja Utama pada RPD dan Renstra Papua Barat Tahun 2023 – 2026.

Penurunan tingkat capaian prevalensi stunting ini adalah hal yang patut diapresiasi namun penurunan yang signifikan belum diiringi dengan optimalnya penginputan data/pelaporan dalam aplikasi data e-PPBGM. Aplikasi e-PPGBM merupakan sumber data rutin status gizi dan prevalensi stunting dan berasal dari penginputan data yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas berdasarkan hasil penimbangan di posyandu setiap bulannya. Dari gambar terlihat bahwa baru sekitar 55,07% capaian entrian data dari sasaran yang terinput. Hal ini menggambarkan belum optimalnya pelaporan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan berpengaruh terhadap kualitas dan keterwakilan data yang dilaporkan.

Tabel III.10. Prevalensi Stunting Papua Barat Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023

No	Nama Wilayah	SSGI 2022	SKI 2023	Trend	
1	Kab. Manokwari	36,6	N/A	-	-
2	Kab. Fakfak	29	30,5	Naik	1,5
3	Kab. Kaimana	29,2	25,7	Turun	3,5
4	Kab. Teluk Bintuni	22,8	19,6	Turun	3,2
5	Kab. Teluk Wondama	26,1	19,7	Turun	6,4
6	Kab. Manokwari Selatan	27,2	20,4	Turun	6,8
7	Kab. Pegunungan Arfak	51,5	34,7	Turun	16,8
Provinsi Papua Barat		30	24,8	Turun	5,2

Sumber : Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023

Berdasarkan Data SSGI dan SKI, Prevalensi Stunting Papua Barat Tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 5,2%, yaitu dari angka 30% di Tahun 2022 menjadi 24,8% di Tahun 2023. Kabupaten dengan penurunan angka signifikan adalah Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu dari 51,5% menjadi 34,7% atau turun 16,8 poin. Kabupaten dengan Prevalensi terendah berada pada Kabupaten Teluk Bintuni dengan angka 19,6%.

Tabel III.11. Indikator dan Target Prevalensi Stunting Pada RPJMN Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024

PP/KP/PRO-P/PROYEK KL	INDIKATOR RPJMN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
PP: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24.1	21.1	18.4	16	14

Data dalam tabel menunjukkan indikator prevalensi stunting yang ditetapkan dalam RPJMN Kementerian Kesehatan dimana Tahun 2024 target yang ditetapkan adalah 14%. Jika disandingkan dengan capaian Provinsi Papua Barat berdasarkan data e-PPGBM (14,73%) terlihat bahwa capaian Provinsi Papua Barat melebihi target RPJMN Tahun 2024, namun masih kurang jika dibandingkan dengan capaian prevalensi stunting berdasarkan data SKI (24,8%). Provinsi Papua Barat terus berupaya meningkatkan

capaian dan kinerja dalam hal pelaporan dan penginputan data hasil capaian indikator dalam e-PPGBM di tingkat Kabupaten termasuk dukungan sumber daya manusia, dana dan peningkatan tenaga terlatih. Selain tantangan dalam masalah pelaporan, Papua Barat juga masih dihadapkan dengan tantangan lainnya antara lain yaitu asupan gizi dan status kesehatan yang meliputi ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi), lingkungan sosial (norma, makanan bayi dan anak, hygiene, pendidikan, dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses, pelayanan preventif dan kuratif), dan lingkungan pemukiman (air, sanitasi, kondisi bangunan).

Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan mengalami penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan atau panjang badan bayi di bawah standar. Asupan gizi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh seperti pemberian kolostrum (ASI yang pertama kali keluar), inisiasi menyusui dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, dan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) secara tepat. Selain itu, faktor kesehatan lingkungan seperti akses air bersih dan sanitasi layak serta pengelolaan sampah juga berhubungan erat dengan kejadian infeksi penyakit menular pada anak yang meningkatkan risiko terjadinya stunting. Dinas kesehatan Provinsi Papua Barat dan kabupaten akan terus meningkatkan strategi atau langkah konkrit dalam upaya penurunan stunting seperti pemberian makanan tambahan ke balita stunting dan ibu hamil kurang energi kronis, upaya preventif dan promotif dan pelayanan gizi dan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Penyebab tidak langsung masalah stunting juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, sistem pangan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan, sehingga untuk mengatasi penyebab stunting, diperlukan komitmen dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor secara menyeluruh dan berkesinambungan.

7. Persentase Balita Gizi Buruk

Grafik III.9. Prevalensi Wasting Berdasarkan Data Entry Elektronik Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Tahun 2024



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Papua Barat

Tabel III.12. Persentase Balita Gizi Buruk (wasting) di Papua Barat Tahun 2024 dan Indikator dan Target sesuai Renstra Tahun 2024

Target Kinerja Renstra (IKU) RPD (2024)	Capaian (2024)
7.50%	10.00%

Menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2020, balita wasting (kurus dan sangat kurus) adalah balita gizi kurang dan gizi buruk. Dari gambar diatas, persentase wasting (balita gizi buruk) di Papua Barat Tahun 2024 adalah sebesar 10%, masih lebih tinggi / masih dibawah target yang ingin dicapai pada IKU Renstra Dinas Kesehatan. Permasalahan dalam pencapaian kinerja sesuai dengan targettarget indikator, salah satunya adalah disebabkan oleh pelaporan/penginputan data Balita wasting yang diukur ke dalam aplikasi e-PPGBM yang belum optimal.

Tabel III.13. Prevalensi Balita wasting berdasarkan SKI Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Status Gizi Balita								N tertimbang
	Stunting		Wasting		Underweight		Overweight		
	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	
Fakfak	30,5	24,8 - 36,9	8,2	5,5 - 12,0	21,5	17,4 - 26,3	6,4	4,2 - 9,6	123
Kaimana	25,7	19,6 - 32,8	9,3	6,5 - 13,3	16,9	13,8 - 20,6	4,8	3,1 - 7,2	87
Teluk Wondama	19,7	15,6 - 24,7	11,7	9,0 - 15,2	22,8	18,4 - 28,1	2,1**	0,8 - 5,4	77
Teluk Bintuni	19,6	14,5 - 25,9	7,5	5,4 - 10,3	16,3	12,0 - 21,9	2,9**	1,4 - 5,7	103
Manokwari	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	
Manokwari Selatan	20,4	15,6 - 26,3	12,5	10,0 - 15,6	16,5	12,5 - 21,4	4,2	2,6 - 6,6	52
Pegunungan Arfak	34,7	25,8 - 44,9	14,6	10,2 - 20,4	23,4	16,7 - 31,7	6,0**	3,3 - 10,8	52
PAPUA BARAT	24,8	21,3 - 28,6	11,6	9,7 - 13,7	20,1	17,1 - 23,5	4,8	3,6 - 6,3	751

*N/A : Response Rate Blok Sensus (RR BS) atau Response Rate Rumah Tangga (RR Ruta) Balita < 70%

**Relative Standard Error (RSE) > 25% merupakan estimasi akurasi yang kurang baik untuk menggambarkan populasi balita di kab/kota

Sumber : Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023

Dari gambar diatas, berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, diketahui bahwa Papua Barat memiliki prevalensi balita stunting yang

cukup tinggi (11,6%), lebih tinggi dibandingkan target RPJMN Tahun 2024 sebesar 7% dan Target IKU Renstra Dinas Kesehatan (7,50%). Capaian indicator 11,6 % ini tidak terlampaui berbeda jika dibandingkan dengan capaian prevalensi wasting / gizi buruk berdasarkan data E-PPGBM yakni sebesar 10%. Masih tingginya prevalensi wasting sangat berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Wasting dan stunting adalah masalah gizi yang saling terkait, dimana kedua bentuk masalah gizi ini memiliki faktor risiko yang sama dan saling memperburuk kondisi satu dan lainnya. Selain risiko kematian yang tinggi, anak wasting yang tidak ditangani dengan baik berisiko lebih tinggi menjadi stunting dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi masih tingginya persentase Balita gizi buruk (wasting) di Papua Barat antara lain dari segi faktor ibu, adalah kehamilan di usia remaja, malnutrisi, terinfeksi penyakit menular seksual, dan bagi anak, antara lain adalah lahir prematur, Berat badan lahir rendah (BBLR), pola asuh yang tidak mendukung tumbuh kembang anak dan hygiene dan sanitasi lingkungan yang buruk.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten terus berupaya meningkatkan kinerja dalam upaya penurunan persentase Balita gizi buruk bersama dengan langkah-langkah penurunan prevalensi stunting. Kegiatan-kegiatan intervensi spesifik dan sensitif terus akan dilaksanakan dan ditingkatkan. Advokasi dan koordinasi serta kolaborasi dengan lintas sektor juga akan terus dimaksimalkan dalam upaya penurunan persentase wasting/gizi buruk, yang terkait erat dengan capaian prevalensi stunting Papua Barat.



E. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

Tabel III.14. Target Indikator dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024

No.	Indikator Program	Satuan	2024	
			Target	Realisasi
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	2.1 : 1000	1.79 : 1000
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persen	100	100
3	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	93,33
4	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100	97,14
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Ibu	70,28	175,82
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi	8,9	8,79
7	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi	Persen	40	100
8	Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persen	45	100
9	Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Persen	65	14,29
10	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten/Kota	1	1
11	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persen	50	87
12	Prevalensi HIV	Persen	2,5	2,3
13	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	8	12,27
14	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kabupaten/Kota	4	6

15	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	80	90
16	Capaian Universal Health Coverage (UHC)	Persen	100	107,26
17	Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	Persen	45,4	36,25
18	Persentase Puskesmas Tersedia Obat Esensial	Persen	70	70,83
19	Persentase FKTP Terakreditasi	Persen	55	92,5
20	Jumlah Kematian Jemaah Haji	Orang	0	1
21	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak yang dilaksanakan	Layanan	3	4
22	Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persen	55	69,1
23	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persen	100	100
24	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persen	100	n.a
25	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	35	24,05
26	Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	Orang	30	26
27	Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-KIS	Persen	95	96,1
28	Persentase Posyandu Aktif (Posyandu Buka Layanan dan Melaporkan Kegiatan Posyandu)	Persen	80	41,86
29	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kabupaten/Kota	4	3
30	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persen	100	92,14

F. Realisasi Anggaran

Dalam Rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat daerah (OPD), berikut adalah Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran per Program/ Kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Papua Barat bisa dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III.15. Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2024) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
					K		Rp.	K		Rp.	
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Lakip	Rp 41,883,708,264				Rp 41,883,708,264			Rp 35,979,457,323	85.90%
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 64,629,422				Rp 64,629,422			Rp 64,623,000	99.99%
		1.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 29,629,422	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 29,629,422	1	Dokumen	Rp 29,629,000	100.00%
		1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 35,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp 35,000,000	1	Laporan	Rp 34,994,000	99.98%
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 38,799,912,192				Rp 38,799,912,192			Rp 32,901,686,319	84.80%
		1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 36,621,286,048	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	Orang/Bulan	Rp 36,621,286,048	360	Orang/Bulan	Rp 31,079,816,499	84.87%
		1.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Rp 2,143,626,144	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	Rp 2,143,626,144	1	Dokumen	Rp 1,787,637,820	83.39%
		1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 35,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Rp 35,000,000	1	Laporan	Rp 34,232,000	97.81%
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 29,629,422				Rp 29,629,422			Rp 29,260,000	98.75%
		1.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 29,629,422	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Rp 29,629,422	1	Dokumen	Rp 29,260,000	98.75%
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 64,629,422				Rp 64,629,422			Rp 64,259,000	99.43%
		1.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 29,629,422	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp 29,629,422	1	Dokumen	Rp 29,325,000	98.97%
		1.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 35,000,000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	Rp 35,000,000	1	Dokumen	Rp 34,934,000	99.81%
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,183,918,885				Rp 1,183,918,885			Rp 1,183,514,292	99.97%
		1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp 71,400,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 71,400,000	1	Paket	Rp 71,400,000	100.00%
		1.2 Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 175,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 175,000,000	1	Paket	Rp 175,000,000	100.00%

		1.3	penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Rp 75,000,000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 75,000,000	1	Paket	Rp 75,000,000	100.00%
		1.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 110,292,885	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Rp 110,292,885	1	Laporan	Rp 110,266,333	99.98%
		1.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 752,226,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Rp 752,226,000	1	Laporan	Rp 751,847,959	99.95%
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 860,829,249				Rp 860,829,249			Rp 857,724,941	99.64%
		1.1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 766,837,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp 766,837,400	1	Laporan	Rp 763,734,941	99.60%
		1.2	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Rp 93,991,849	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 93,991,849	1	Laporan	Rp 93,990,000	100.00%
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 880,159,672				Rp 880,159,672			Rp 878,389,771	99.80%
		1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 349,906,200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21	Unit	Rp 349,906,200	21	Unit	Rp 348,185,391	99.51%
		1.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 169,930,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	191	Unit	Rp 169,930,000	191	Unit	Rp 169,885,000	99.97%
		1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 360,323,472	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59	Unit	Rp 360,323,472	59	Unit	Rp 360,319,380	100.00%
2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata		Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	Rp 47,252,841,745				Rp 47,252,841,745			Rp 32,364,960,857	68.49%
		1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 25,706,944,923				Rp 25,706,944,923			Rp 14,409,094,310	56.05%
		1.1	Pengembangan Rumah Sakit	Rp 16,991,456,923	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	Unit	Rp 16,991,456,923	1	Unit	Rp 6,966,882,000	41.00%
		1.2	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Rp 500,000,000	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	3	Layanan	Rp 500,000,000	3	Layanan	Rp 497,966,498	99.59%

	1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 1,807,450,000	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Unit	Rp 1,807,450,000	1	Unit	Rp 1,802,668,000	99.74%
	1.4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 2,500,000,000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6	Unit	Rp 2,500,000,000	3	Unit	Rp 2,105,070,000	84.20%
	1.5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp 2,218,148,000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1	Paket	Rp 2,218,148,000	1	Paket	Rp 1,347,344,512	60.74%
	1.6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp 1,689,890,000	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1	Dokumen	Rp 1,689,890,000	1	Dokumen	Rp 1,689,163,300	99.96%
	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 19,709,403,496				Rp 19,709,403,496			Rp 16,219,234,183	82.29%
	1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Rp 2,500,000,000	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1000	Orang	Rp 2,500,000,000	1000	Orang	Rp 1,147,090,243	45.88%
	1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 1,780,838,250	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000	Orang	Rp 1,780,838,250	85718	Orang	Rp 1,157,397,600	64.99%
	1.3	pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu dan anak	Rp 713,550,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	Dokumen	Rp 713,550,000	1	Dokumen	Rp 663,036,860	92.92%
	1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Rp 75,328,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	Rp 75,328,000	1	Dokumen	Rp 74,040,000	98.29%
	1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Rp 75,328,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	Dokumen	Rp 75,328,000	1	Dokumen	Rp 75,264,000	99.92%
	1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 116,078,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	Rp 116,078,000	1	Dokumen	Rp 107,937,300	92.99%
	1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 99,237,916	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	Rp 99,237,916	1	Dokumen	Rp 98,313,316	99.07%

1.8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 250,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	Rp 250,000,000	1	Dokumen	Rp 246,468,000	98.59%
1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp 173,848,463	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	Rp 173,848,463	1	Dokumen	Rp 168,852,800	97.13%
1.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 1,197,789,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1	Dokumen	Rp 1,197,789,000	1	Dokumen	Rp 1,019,174,438	85.09%
1.11	pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	Rp 8,521,319,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	Rp 8,521,319,000	1	Dokumen	Rp 7,888,582,876	92.57%
1.12	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 614,630,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	Rp 614,630,000	1	Dokumen	Rp 364,803,600	59.35%
1.13	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Rp 384,112,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 384,112,000	1	Dokumen	Rp 339,183,510	88.30%
1.14	Pembinaan Pelaksanaan Upaya pelayanan Kesehatan	Rp 1,374,070,127	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp 1,374,070,127	1	Dokumen	Rp 1,343,734,300	97.79%
1.15	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Rp 150,656,000	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1	Dokumen	Rp 150,656,000	1	Dokumen	Rp 131,403,400	87.22%
1.16	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Rp 75,328,000	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 75,328,000	-	Dokumen	Rp -	0.00%
1.17	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp 65,015,000	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	Rp 65,015,000	1	Unit	Rp 64,015,000	98.46%
1.18	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Rp 339,379,740	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp 339,379,740	1	Dokumen	Rp 183,254,740	54.00%
1.19	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Rp 204,300,000	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	Paket	Rp 204,300,000	1	Paket	Rp 148,938,000	72.90%

		1.20	Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan	Rp 998,596,000	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	Dokumen	Rp 998,596,000	1	Dokumen	Rp 997,744,200	99.91%
	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Rp 563,441,337				Rp 563,441,337			Rp 548,302,762	97.31%
		1.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 563,441,337	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	Rp 563,441,337	1	Dokumen	Rp 548,302,762	97.31%
	4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Rp 384,608,463				Rp 384,608,463			Rp 335,353,063	87.19%
		1.1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Rp 146,533,200	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2	Unit	Rp 146,533,200	2	Unit	Rp 98,615,000	67.30%
		1.2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 238,075,263	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2	Unit	Rp 238,075,263	2	Unit	Rp 236,738,063	99.44%
	5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Rp 888,443,526				Rp 888,443,526			Rp 852,976,539	96.01%
		1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Rp 391,445,280	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp 391,445,280	1	Dokumen	Rp 377,190,000	96.36%
		1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Rp 238,562,846	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp 238,562,846	1	Dokumen	Rp 234,031,600	98.10%
		1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Rp 258,435,400	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp 258,435,400	1	Dokumen	Rp 241,754,939	93.55%
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata		Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	Rp 9,936,477,995				Rp 9,936,477,995			Rp 9,070,750,272	91.29%
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Rp 1,366,500,000				Rp 1,366,500,000			Rp 889,787,443	65.11%
		1.1	peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Rp 866,500,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	13	Orang	Rp 866,500,000	10	Orang	Rp 737,751,560	85.14%
		1.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 500,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	Rp 500,000,000	1	Dokumen	Rp 152,035,883	30.41%

		2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 4,033,977,995				Rp 4,033,977,995			Rp 3,699,059,557	91.70%
		1.1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Rp 4,033,977,995	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan bagi Orang Asli Papua	25	Orang	Rp 4,033,977,995	16	Orang	Rp 3,699,059,557	91.70%
		3 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Rp 4,536,000,000				Rp 4,536,000,000			Rp 4,481,903,272	98.81%
		1.1 Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Rp 4,536,000,000	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	10000	Orang	Rp 4,536,000,000	10229	Orang	Rp 4,481,903,272	98.81%
4	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	Rp 155,220,724				Rp 155,220,724			Rp 111,834,400	72.05%
		1 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Rp 100,538,621				Rp 100,538,621			Rp 65,976,800	65.62%
		1.1 Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang PAK	Rp 100,538,621	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	3	Sarana	Rp 100,538,621	1	Sarana	Rp 65,976,800	65.62%
		2 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Rp 54,682,103				Rp 54,682,103			Rp 45,857,600	83.86%
		1.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp 54,682,103	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1	Sarana	Rp 54,682,103	1	Sarana	Rp 45,857,600	83.86%
5	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Rp 997,656,900				Rp 997,656,900			Rp 949,929,850	95.22%
		1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Rp 222,328,900				Rp 222,328,900			Rp 208,836,900	93.93%
		1.1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan, Penggalangan kemitraan, peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Provinsi	Rp 222,328,900	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas pemberdayaan masyarakat	1	Dokumen	Rp 222,328,900	1	Dokumen	Rp 208,836,900	93.93%
		2 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Rp 75,328,000				Rp 75,328,000			Rp 74,433,750	98.81%
		1.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp 75,328,000	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	Rp 75,328,000	1	Dokumen	Rp 74,433,750	98.81%
		3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Rp 700,000,000				Rp 700,000,000			Rp 666,659,200	95.24%
		1.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Rp 700,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	Dokumen	Rp 700,000,000	1	Dokumen	Rp 666,659,200	95.24%
6	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin	Persentase Balita Gizi Buruk	Rp 2,066,100,639				Rp 2,066,100,639			Rp 1,702,716,400	82.41%
		1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 2,066,100,639				Rp 2,066,100,639			Rp 1,702,716,400	82.41%
		1.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 2,066,100,639	meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan	1	Dokumen	Rp 2,066,100,639	1	Dokumen	Rp 1,702,716,400	82.41%

G. Dokumentasi Kegiatan

Gambar III.2. Pelayanan Kesehatan Bergerak





Gambar III.3. Sosialisasi Stunting, PHBS untuk anak Sekolah dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan dan Bencana.



Gambar III.4. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)



DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



**HARI KESEHATAN
NASIONAL KE-60**
Gerak Bersama, Sehat Bersama

Kegiatan UKBM Kampung Pasir Putih Fakfak Tengah



 <https://dinkes.papuabaratprov.go.id>

 [dinkes_pabar](#)

 [Humas_DinkesPB](#)

 [Dinas Kesehatan Papua Barat](#)



DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



HARI KESEHATAN
NASIONAL KE-60
Gerak Bersama, Sehat Bersama



Kegiatan UKBM SD Tanama Pariwari



<https://dinkes.papuaratprov.go.id>



dinkes_pabar



Humas_DinkesPB



Dinas Kesehatan Papua Barat

Gambar III.5. Kegiatan Deteksi Dini Malaria, TB, dan HIV/AIDS





Gambar III.6. Kegiatan-Kegiatan yang mendukung Upaya Penurunan Prevalensi Stunting



Gambar III.7. Penyediaan Ruangan Cathlab RSUD Provinsi Papua Barat



Gambar III.8. Pembangunan Gedung KJSU Tahap II





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

Penghargaan
Pembina Terbaik
Keamanan Pangan
Olahan Siap Saji
(POSS)

BAB-IV PENUTUP

Perwakilan Daerah
Provinsi Papua Barat
Menerima Penghargaan
Pembina Terbaik
Keamanan Pangan Olahan
Siap Saji (POSS) Tingkat
Provinsi dan Kabupaten
Kota Tahun 2024. (Jakarta
10 Desember 2024)



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai unsur Penyelenggara Negara, wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan instansi.

Dalam rangka pelaksanaan inpres tersebut maka ditetapkan keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/8/2003 tentang pendoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan LAKIP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2024 menggambarkan pencapaian kinerja selama Tahun 2024. Pencapaian kinerja berupa pelaksanaan kegiatan ini disusun dan dilaksanakan berdasarkan rencana kinerja tahun 2024 yang mengacu pada rencana strategis 2024 – 2026 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melaksanakan 59 (Lima Puluh Sembilan) sub kegiatan dan 20 (Dua Puluh) kegiatan dalam 5 (Lima) program untuk memenuhi 7 (Tujuh) sasaran strategis sesuai dengan rencana kinerja tahun 2024.

Total Pagu Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 102.292.006.267,00 (Seratus Dua Milyar Dua ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dari jumlah tersebut di atas realisasi serapannya sebesar Rp. 80.179.649.102,00,- (Delapan puluh Milyar Seratus tujuh Puluh Sembilan juta Enam ratus empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Rupiah) atau 78,38% dari anggaran yang tersedia, dengan uraian sasaran strategis dengan persentasenya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah (85,90%)
2. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata (68,49%)
3. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata (91,29%)
4. Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan (72,05%)
5. Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat (95,22%)
6. Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin (82,41%)

1. Permasalahan dan pemecahan masalah :

a. Kurang optimalnya tingkat penyerapan anggaran :

1. Kurangnya kuantitas dan Kualitas ASN khususnya dalam pengelolaan keuangan pada OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
2. Belum berjalannya secara optimal Sistem Pengendalian Interen (SPI) dan belum dibuatnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) terutama SOP terkait Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Anggaran pada OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

b. Strategi pemecahan masalah berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi tersebut, strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan Kualitas aparat dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dengan melakukan penempatan ASN sesuai dengan disiplin ilmu dan kebutuhan.
2. Membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) baik untuk kegiatan Admintrasi Umum ataupun

Kegiatan Teknis sehingga lebih memudahkan dalam hal Evaluasi dan Monitoring pengelolaan Anggaran OPD Dinas Kesehatan Papua Barat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat ini dibuat, kekurangan dan kelemahan semoga bapak dan ibu sekalian berkenan memberikan kritik dan saran agar kami dapat memperbaiki laporan ini di tahun-tahun yang akan datang.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk penyelesaian laporan ini, Semoga Tuhan Memberkati .

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT,



dr. ALWAN RIMOSAN, Sp.B.FINACS
PEMBINA TK. I
NIP.19691027 200012 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA BARAT**

LAMPIRAN



DR. IR. JACOB FONATABA
Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA BARAT

Penghargaan

Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat

*Sebagai Pemerintah Daerah
Dengan Kategori Utama
Dalam Pencapaian Universal
Health Coverage Tahun 2024*

LAMPIRAN

- A.** Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- B.** Formulir E.55 Evaluasi Hasil Terhadap Renja OPD Lingkup Provinsi Tahun 2024;
- C.** Pohon Kinerja;
- D.** Cascading dan Keselarasan;
- E.** Crosscutting;
- F.** Prestasi / Penghargaan yang diperoleh.





2024

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

Website: <https://dinkes.papuabaratprov.go.id>

Email : dinaskesehatanprovpapuabarat@gmail.com

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfaj, Manokwari. Kode Pos: 98315.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PAPUA BARAT 2024

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
															Target	Anggaran (Rp)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	B Kategori	19,793,793,043	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Manokwari	RKA dan DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun Berjalan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	29,629,422	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
										2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Manokwari	Kinerja Dinas Kesehatan provinsi papua Barat per tahun anggaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	35,000,000	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
								2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manokwari	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/Bulan	14,793,793,043	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
										2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Manokwari	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,881,203,928	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
										3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Manokwari	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	35,000,000	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
								3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	29,629,422	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
								4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Manokwari	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	29,629,422	Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
										2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Manokwari	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	35,000,000	Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
								5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Manokwari	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	71,400,000	Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
										2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Manokwari	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	175,000,000	Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
										3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Manokwari	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000,000	Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
										4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Manokwari	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	110,292,885	Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
															Target	Anggaran (Rp)	
								1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Terlaksananya pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	3 Layanan	500,000,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
										1.1	Pelayanan Kesehatan Bergerak				500,000,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
										2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Manokwari	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana	1 Unit	800,000,000	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
										3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Papua Barat	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	2,100,000,000	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset, UPTD FARMASI
										3.1	Pengadaan Kendaraan Ambulance Jenazah				1 Unit	900,000,000	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
										3.2	Pengadaan mobil jenazah RSUD Kabupaten Pegunungan Arfak				1 Unit	800,000,000	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
										3.3	Pengadaan Alat kesehatan rumah gizi				1 Unit	380,433,000	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
										3.4	Pengadaan Kursi Roda					6,045,600	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
										3.5	Pengadaan Thermometer Untuk UPTD Farmasi					11,900,000	UPTD FARMASI

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
															Target	Anggaran (Rp)	
										3.6	Walker					1,621,400	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
										4	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Papua Barat	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1,090,380,000	UPTD FARMASI
										4.1	Bahan Repacking Distribusi Obat dan BMHP UPTD Farmasi Papua Barat					89,500,000	UPTD FARMASI
										4.2	Distribusi Obat, BMHP, dan Vaksin dari Provinsi ke Kab/Kota (UPTD Farmasi Papua Barat)					150,880,000	UPTD FARMASI
										4.3	Distribusi Obat, BMHP, dan Vaksin dari Provinsi ke Kab/Kota (UPTD Farmasi Papua Barat)					850,000,000	UPTD FARMASI
										5	Pengembangan Rumah Sakit		Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	7,200,000,000	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
										6	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Papua Barat	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	2,218,148,000	Seksi Kefarmasian

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
															Target	Anggaran (Rp)	
								2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1000 Orang	2,500,000,000	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
										2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1,780,838,250	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
										2.1	Kebutuhan Logistik Kesehatan					976,598,250	Seksi Surveilans & Imunisasi
										2.2	Pelayanan Kesehatan di fasilitas layanan kesehatan					207,000,000	Seksi Surveilans & Imunisasi
										2.3	Pelayanan Kesehatan Di luar fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat Provinsi					597,240,000	Seksi Surveilans & Imunisasi
										3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Papua Barat	Penurunan Jumlah Kematian Ibu (AKI) per tahun dan Angka Kematian anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	713,550,000	Seksi Kesga dan Gizi
										3.1	Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, skrining layak hamil, ANC dan stunting (DAK)					237,463,000	Seksi Kesga dan Gizi
										3.2	Rapat evaluasi lintas sektor Kesehatan Ibu dan Anak termasuk masalah gizi (weight faltering, gizi buruk, gizi kurang, stunting) (DAK)					476,087,000	Seksi Kesga dan Gizi
										4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Papua Barat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	75,328,000	Seksi Kesga dan Gizi

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
															Target	Anggaran (Rp)	
										4.1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Produktif di Kabupaten					75,328,000	Seksi Kesga dan Gizi
										5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	75,328,000	Seksi Kesga dan Gizi
										5.1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten					75,328,000	Seksi Kesga dan Gizi
										6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	75,328,000	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga
										6.1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di Kabupaten					75,328,000	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga
										7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	99,237,916	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga
										8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	250,000,000	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
										8.1	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Promosi Kesehatan di Kabupaten dalam mendukung pencegahan stunting OAP (media KIE stunting, aksi bergizi, PHBS, dll)					53,050,000	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
										8.2	Peningkatan kesadaran masyarakat Orang Asli Papua melalui Penyebarluasan Informasi Edukasi Kesehatan, 7 Tema Proiritas Germas dalam Rangka Penggerakan Masyarakat dalam Aksi Bergizi, Germas, PHBS dan lain-lain					75,400,000	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
															Target	Anggaran (Rp)	
										8.3	Peningkatan kesadaran masyarakat Orang Asli Papua melalui Penyebarluasan Media KIE Kesehatan Cegah Stunting Itu Penting					68,650,000	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
										8.4	Peningkatan kesadaran masyarakat Orang Asli Papua melalui Penyebarluasan Media KIE Kesehatan Posyandu di daerah dalam rangka Penggerakan Posyandu Aktif					52,900,000	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
										9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Papua Barat	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	173,848,463	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
										9.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					4,928,500	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
										9.2	Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Mendorong Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Kabupaten/Kota					168,919,963	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
										10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1,197,789,000	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular , Seksi PTM dan kesehatan jiwa, seksi surveilans dan imunisasi
										10.1	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terintegrasi					700,755,162	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular , Seksi PTM dan kesehatan jiwa
										10.2	Kegiatan Pertemuan Harmonisasi PERDA KTR					146,448,838	Seksi PTM dan Kesehatan Jiwa

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
															Target	Anggaran (Rp)	
										10.3	Pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke laboratorium rujukan nasional/regional (Surveilans rutin, sentinel, dan dugaan penyakit potensial KLB/Wabah/penyakit Infeksi Emerging/penyakit tidak lazim, media lingkungan, sampel PD3I, sampel ILI SARI) Rujukan DAK					171,805,000	Seksi Surveilans & Imunisasi
										10.4	Monev PERDA KTR					178,780,000	Seksi PTM dan Kesehatan Jiwa
										11	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	8,000,000,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
										11.1	Kontribusi Iuran PBI JK					8,000,000,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
										12	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	614,630,000	Seksi Surveilans & Imunisasi, Seksi Kesga dan Gizi
										12.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Kader, Tokoh Masyarakat, Toko Agama dalam Penemuan Kasus Surveilans PD3I dan Penyakit Surveilans Lainnya					300,000,000	Seksi Surveilans & Imunisasi
										12.2	Rapat Evaluasi Kematian Ibu dan Anak DAK					228,823,000	Seksi Kesga dan Gizi
										12.3	Verifikasi sinyal/penyelidikan Epidemiologi (PE)/pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB atau Wabah/penyakit tidak lazim/investigasi kasus KUPI, serta PE penyakit menular lainnya, PD3I, keracunan makanan dan penyakit lingkungan DAK					85,807,000	Seksi Surveilans & Imunisasi

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
															Target	Anggaran (Rp)	
										13	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Papua Barat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	153,556,000	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
										14	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Papua Barat	Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	278,177,127	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
										14.1	Operasional Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Papua Barat				3,881,127	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
										14.2	Operasional Klinik Kantor Gubernur				84,600,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
										14.3	Pencanangan Program Masyarakat Orang Asli Papua Gratis Biaya Berobat				189,696,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
										15	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Papua Barat	Terlaksananya Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi	1 Dokumen	150,656,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
										16	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Papua Barat	Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		75,328,000	Seksi Surveilans & Imunisasi
										17	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Papua Barat	Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	75,328,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
										17.2	Monev Public Safety Center (PSC) 119				75,328,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
										18	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik		Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	500,000,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
										18.1	Pembiayaan Rumah Sakit Jiwa				500,000,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
															Target	Anggaran (Rp)	
										19	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Papua Barat	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	274,550,000	Seksi Surveilans & Imunisasi
										20	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Papua Barat	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	500,000,000	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
										20.1	Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Imunisasi Rutin dan Surveilans Penyakit Potensial KLB				500,000,000	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	
								3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	Terlaksananya Pengelolaan Sitem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	200,000,000	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
										1.2	Belanja Aplikasi/Software Aplikasi Satu Data Tahap 1 (Biaya Pembuatan dan Hosting)				181,963,638	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas	
										1.2	Rapat Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				18,036,362	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas	
								4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Papua Barat	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 unit	150,656,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
										1.2	Monev ASPAK				75,328,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
										1.2	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Rujukan Terintegrasi Papua Barat				63,948,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
										1.3	Penyusunan Regulasi Dalam Rangka Pemetaan Sistem Rujukan Terintegrasi Papua Barat				11,380,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
															Target	Anggaran (Rp)	
									2		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Papua Barat	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2 Unit	249,832,463	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan seksi alkes dan PKRT
									2.1		Monev Kalibrasi Alat Kesehatan Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Bagi OAP				99,176,463	Seksi alkes dan PKRT	
									2.2		monev peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan				75,328,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
									2.3		Monitoring Evaluasi Perijinan Alat Kesehatan dan PKRT Sebagai Dukungan Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi OAP				75,328,000	Seksi alkes dan PKRT	
								5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS		Prevalensi HIV	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Dokumen	391,445,280	Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
									1.1		Pelaksanaan Screening HIV				228,388,221	Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular	
									1.2		Penyuluhan HIV Bagi Anak Sekolah				163,057,059	Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular	
									2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Dokumen	238,562,846	Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
									2.1		Pelacakan Survei Kontak TBC				138,641,059	Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular	

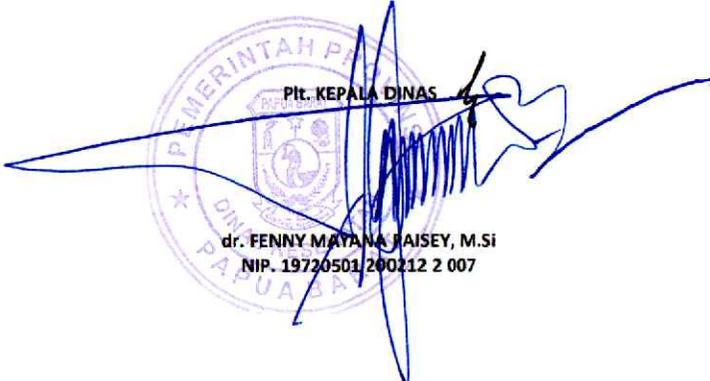
No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
															Target	Anggaran (Rp)	
										2.2	Pelaksanaan Screening TB					99,921,787	Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
									3		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria		Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Dokumen	258,435,400	Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
										3.1	Pelaksanaan Seueveil Resetifitas Malaria					129,476,341	Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
										3.2	Screening Massal Malaria					128,959,059	Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Sumber daya manusia kesehatan yang memadai	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	35	Persen					11,736,773,995					
					Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	30	Orang										
					Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-KIS	95	Persen										
								1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Papua Barat	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	11 Orang	866,500,000	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
										1.1	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)					144,000,000	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
										1.2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)					242,500,000	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
										1.1	Beasiswa Tugas Belajar S2					480,000,000	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
															Target	Anggaran (Rp)	
									2		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	500,000,000	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									2.1		Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK Orang Asli Papua Tingkat Provinsi					126,775,736	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									2.2		Perekrutan Nakes Teladan					176,335,117	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									2.3		Monitoring dan Evaluasi Data SISDMK					66,967,147	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									2.4		Analisis Kebutuhan SDMK Orang Asli Papua					123,392,000	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									2.5		Pakaian Batik					6,530,000	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
								2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	25 Orang	5,834,273,995	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									1.1		Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Bagi Tenaga Kesehatan					353,249,995	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									1.2		Penyusunan Regulasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Bagi tenaga Kesehatan					9,800,000	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									1.3		Biaya Pendidikan Dokter Spesialis Bagi Tenaga Kesehatan					4,306,660,000	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									1.4		Biaya Kontribusi/Biaya Prodi/Biaya UKT Kemitraan					774,000,000	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									1.5		Pendidikan D-III Keperawatan					351,000,000	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									1.6		Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Evaluasi dan Pembuatan Kerjasama					39,564,000	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag	
															Target	Anggaran (Rp)		
								3	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	1	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN		Meningkatnya Kesehatan Bagi Orang Asli Papua	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	10000 orang	4,536,000,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
										1.1	Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) OAP					4,536,000,000	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
4	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	100	Persen	155,220,724										
					Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	100	Persen											
									1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Papua Barat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	3 Sarana	100,538,621	Seksi Kefarmasian
										1.1	Pengawasan Terhadap Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) di Provinsi Papua Barat					100,538,621	Seksi Kefarmasian	
									2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1 Sarana	54,682,103	Seksi Kefarmasian
										1.1	Perizinan serta Pengawasan Usaha Kecil Obat (UKOT) Tradisional di Provinsi Papua Barat					54,682,103	Seksi Kefarmasian	

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
						Target	Persen									Target	Anggaran (Rp)	
5	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif	Presentase Posyandu Aktif (Posyandu Buka Layanan dan Melaporkan Kegiatan Posyandu)	70.32	Persen	997,656,900										
					Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	2.00	Kabupaten											
									1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Papua Barat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	222,328,900	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
											1.1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat OAP dan Lintas Sektor Tingkat Daerah(Kampung) dalam mendukung upaya pencegahan stunting					222,328,900	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
									2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Seha	Papua Barat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	75,328,000	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
											1.1	Monitoring evaluasi penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam mendukung upaya pencegahan stunting					75,328,000	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
									3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Papua Barat	Terlaksananya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	700,000,000	Seksi Kesga dan Gizi

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag	
															Target	Anggaran (Rp)		
										1.1	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) khusus OAP (Fakfak, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak)	(Kaimana, Pegaf dan Mansel)			700.000.000		Seksi Kesga dan Gizi	
6	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN DAN PERORANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	100	Persen				2.066.100.639							
									1		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	2.066.100.639		
										1.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan PMT Bagi sasaran Bayi/Balita Orang Asli Papua					206.340.639		Seksi Kesga dan Gizi
										1.2	Pengadaan Susu SGM 6 - 12 Bulan dan SGM 1 + Bagi Orang Asli Papua					1.859.760.000		Seksi Kesga dan Gizi



PL. KEPALA DINAS
 dr. FENNY MAYANA RAISEY, M.Si
 NIP. 19720501200212 2 007



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)	TRIWULAN	TARGET
1	2			3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Koordinasi Kebijakan Daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	Triwulan I	100
							Triwulan II	
							Triwulan III	
							Triwulan IV	
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kematian Bayi	8.9	Triwulan I	8.9
							Triwulan II	
							Triwulan III	
							Triwulan IV	
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kematian Ibu	70.28	Triwulan I	70.28
							Triwulan II	
							Triwulan III	
							Triwulan IV	
				Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	8	Triwulan I	8
							Triwulan II	
							Triwulan III	
							Triwulan IV	
				Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persen	50	Triwulan I	50
							Triwulan II	
							Triwulan III	
							Triwulan IV	
Capaian Universal Health Coverage (UHC)	Persen	100	Triwulan I	100				
			Triwulan II					
			Triwulan III					
			Triwulan IV					
Jumlah Kabupaten Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kabupaten	4	Triwulan I	4				
			Triwulan II					
			Triwulan III					
			Triwulan IV					
Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota	1	Triwulan I	1				
			Triwulan II					
			Triwulan III					
			Triwulan IV					

			Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak yang dilaksanakan	Layanan	3	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3
			Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persen	55,0	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	55,0
			Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	Persen	45.4	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	45.4
			Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	80	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	80
			Persentase FKTP Terakreditasi	Persen	55	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	55
			Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Persen	65	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	65
			Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persen	45	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	45
			Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi	Persen	40	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	40
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100

				Persentase Puskesmas Tersedia Obat Esensial	Persen	70	Triwulan I	70
							Triwulan II	
							Triwulan III	
							Triwulan IV	
				Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persen	100	Triwulan I	100
							Triwulan II	
							Triwulan III	
							Triwulan IV	
				Prevalensi HIV	Persen	2.5	Triwulan I	2.5
							Triwulan II	
							Triwulan III	
							Triwulan IV	
				Jumlah Kematian Jemaah Haji	orang	0	Triwulan I	0
							Triwulan II	
							Triwulan III	
							Triwulan IV	
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan : 1000 Rasio TT : 1000 Penduduk		2.1:1000	Triwulan I	2.1:1000
							Triwulan II	
							Triwulan III	
							Triwulan IV	
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Persen	35	Triwulan I	35				
			Triwulan II					
			Triwulan III					
			Triwulan IV					
	Orang	30	Triwulan I	30				
			Triwulan II					
Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-KIS	Persen	95	Triwulan I	95				
			Triwulan II					
			Triwulan III					
			Triwulan IV					
Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persen	100	Triwulan I	100				
			Triwulan II					
			Triwulan III					
			Triwulan IV					
Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persen	100	Triwulan I	100				
			Triwulan II					
			Triwulan III					
			Triwulan IV					
Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	Persen	70.32	Triwulan I	70.32				
			Triwulan II					
			Triwulan III					
			Triwulan IV					
	Kabupaten	2.00	Triwulan I	2				
			Triwulan II					
Triwulan III								
Triwulan IV								

3	Menurunnya Angka Stunting	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persen	100	Triwulan I	100
							Triwulan II	
							Triwulan III	
							Triwulan IV	

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19,793,793,043
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	35,027,033,384
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11,736,773,995
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	155,220,724
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	997,656,900
Jumlah		67,710,478,046

Pihak Kedua



Drs. H. ALI BAHAM TEMONGMERE, MTP
 Plt. Gubernur Papua Barat



Pihak Pertama



DINNY MANANA PAISEY, M.Si
 Plt. Bupati Paniai



PA RIB 19740501 200212 2 007



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Sekretaris
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	RS : Rasio TT : 1000 Penduduk	2.1
		Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten	1
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.832.685.928
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15.222.494.250
Jumlah		35.055.180.178





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
: 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	104
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1
4	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
5	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21
6	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	59
7	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
8	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1
9	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	1
10	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	25
11	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	1000
13	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.793.793.043	
			1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.881.203.928	
			1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.000	
		2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	29.629.422	
			3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	349.906.200
				3.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.323.472
3.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.930.000				
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1 Pengembangan Rumah Sakit	7.200.000.000	
			1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	800.000.000	
			1.3 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.088.100.000	
			1.1.1 Pengadaan Kendaraan Ambulance Jenazah	900.000.000	
			1.1.2 Pengadaan mobil jenazah RSUD Kabupaten Pegunungan Arfak	800.000.000	
			1.1.3 Pengadaan Alat kesehatan rumah gizi	380.433.000	

			1.1.4	Pengadaan Kursi Roda	6.045.600
			1.1.5	Walker	1.621.400
			1,5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.780.838.250
			1,6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.500.000.000
			1,7	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	500.000.000
			1.1.1	Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Imunisasi Rutin dan Surveilens Penyakit Potensial KLB	500.000.000
					32.488.724.315



Pihak Kedua

Drs Bhaktar, Apt, M.Kes
NIP. 19600618 199203 1 002



Pihak Pertama

Thomas O. Saghawari, A.MKL, SKM., M.Kes
NIP. 19651018198903 1008



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

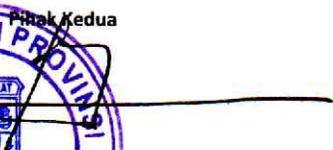
Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
 UNIT KERJA : Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
6	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
8	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
9	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1

No	Program	No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.629.422
				1.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35.000.000
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.292.885
				2.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	752.226.000
				2.3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110.292.885
				2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.000.000
				2.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	766.837.400
				2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.991.849
		Jumlah				

Pihak Kedua

 Dr. Praktiar A.P., M.Kes
 NIP. 196606141992031002

Pihak Pertama

 Thomas O. Saghawati, A.MKI, SKM., M.Kes
 NIP. 196501181989031008



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
 UNIT KERJA : Subbagian Program, Informasi dan Humas
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	2	3	4	5
1	RKA dan DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun Berjalan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
2	Kinerja Dinas Kesehatan provinsi papua Barat per tahun anggaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1
3	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1
4	Terlaksananya Pengelolaan Sitem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1
5	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas	Dokumen	1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29.629.422
			1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1,2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	153.556.000
		2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2,3 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	200.000.000
Jumlah				418.185.422





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Bidang Kesehatan Masyarakat
: 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1				
1	Meningkatkan Kualitas dan Aksebilitas Layanan Kesehatan Yang Merata	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kematian Bayi	8,9
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kematian Ibu	70,28
		Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota	1
		Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Persen	65
		Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persen	45
		Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi	Persen	40
2	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	Persentase Posyandu Aktif (Posyandu Buka Layanan dan Melaporkan Kegiatan Posyandu)	Persen	70
		Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kabupaten	2,00
3	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persen	100

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.517.594.916
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	997.656.900
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.066.100.639
	Jumlah	4.581.352.455



dr. Fenny Mayada Paisey, M.Si.
NIP. 19720501 200212 007



dr. Fenny Mayada Paisey, M.Si.
NIP. 19720501 200212 007



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Puru) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
: 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1
2	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1
3	Terseleenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1,1 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	250.000.000
			1.1.1 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Promosi Kesehatan di Kabupaten dalam mendukung pencegahan stunting OAP (media KIE stunting, aksi bergizi, PHBS, dll)	53.050.000
			1.1.2 Peningkatan kesadaran masyarakat Orang Asli Papua melalui Penyebarluasan Informasi Edukasi Kesehatan, 7 Tema Proiritas Germas dalam Rangka Penggerakan Masyarakat dalam Aksi Bergizi, Germas, PHBS dan lain-lain	75.400.000
			1.1.3 Peningkatan kesadaran masyarakat Orang Asli Papua melalui Penyebarluasan Media KIE Kesehatan Cegah Stunting Itu Penting	68.650.000
			1.1.4 Peningkatan kesadaran masyarakat Orang Asli Papua melalui Penyebarluasan Media KIE Kesehatan Posyandu di daerah dalam rangka Penggerakan Posyandu Aktif	52.900.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1,1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	222.328.900
			1.1.1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat OAP dan Lintas Sektor Tingkat Daerah(Kampung) dalam mendukung upaya pencegahan stunting	222.328.900

		2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	2,2	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	75.328.000
				2.2.1	Monitoring evaluasi penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam mendukung upaya Pencegahan stunting	75.328.000
					Jumlah	547.656.900

Pihak Kedua



dr. Reany Mayana Paisey, M.Si.
NIP. 19720504200212 007

Pihak Pertama



Jessina Jacadewa, SKM., M.Kes
NIP. 19700717 199203 2 011



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Puru) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
: 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Penurunan Jumlah Kematian Ibu (AKI) per tahun dan Angka Kematian anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1
3	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1
4	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1
5	Terlaksananya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1
6	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	713.550.000
			2.1.1 Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, skrining layak hamil, ANC dan stunting (DAK)	237.463.000
			2.1.3 Rapat evaluasi lintas sektor Kesehatan Ibu dan Anak termasuk masalah gizi (weight faltering, gizi buruk, gizi kurang, stunting) (DAK)	476.087.000
			2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	75.328.000
			2.2.1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Produktif di Kabupaten	75.328.000
			2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	75.328.000
			2.3.1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten	75.328.000
			2.4 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	228.823.000
2.4.1 Rapat Evaluasi Kematian Ibu dan Anak DAK	228.823.000			
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	700.000.000
			1.1.1 Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) khusus OAP (Fakfak, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak)	700.000.000

3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.066.100.639
				1.1.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan PMT Bagi sasaran Bayi/Balita Orang Asli Papua	206.340.639
				1.1.2	Pengadaan Susu SGM 6 - 12 Bulan dan SGM 1 + Bagi Orang Asli Papua	1.859.760.000
					Jumlah	3.859.129.639



dr. Fenny Mayana Ralsey, M.Si.
NIP. 1972050119200212 007



Abdul Haris Reboyan, S.Sos., M.Mkes
NIP. 19860919 199203 1 008



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	75.328.000
1.1.1				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di Kabupaten	75.328.000	
1,2				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	99.237.916	
Jumlah						174.565.916

Pihak Kedua
dr. Fenny Mayinda Paisey, M.Si.
NIP. 19720501 200212 007

Pihak Pertama
Frans Abidondifu, SKM, M.Epid.
NIP. 19751008 199903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit
: 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Meningkatkan Kualitas dan Aksebilitas Layanan Kesehatan Yang Merata	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1
		Menurunnya Prevalensi HIV	Persen	2.5
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persen	50
		Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Penduduk	8 per 1000
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100
		Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar	Persen	80
		Jumlah Kabupaten Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	Kabupaten	4
		Jumlah Kematian Jemaah Haji	orang	0
No	Program			Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.821.917.526
	Jumlah			2.821.917.526

Pihak Kedua

dr. Fenny Mayana Palsey, M.Si.
NIP. 19720501-200112 007

Pihak Pertama

dr. Nurmayati
NIP. 19690927-200003 2 008



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
: 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1
2	Prevalensi HIV	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1
3	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1
4	Annual Parasite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	700.755.162	
			1.1.1 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terintegrasi	700.755.162	
		2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	2.1.1 Pelaksanaan Screening HIV	228.388.221
				2.1.2 Penyuluhan HIV Bagi Anak Sekolah	163.057.059
			2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	2.2.1 Pelacakan Survei Kontak TBC	138.641.059
				2.2.2 Pelaksanaan Screening TB	99.921.787
			2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	2.3.1 Pelaksanaan Seuveil Resetifitas Malaria	129.476.341
				2.3.2 Screening Massal Malaria	128.959.059
		Jumlah			1.589.198.688

Pinak Kedua
dr. Nurmayati
NIP. 19690927 200003 2 008



Pinak Pertama
Edi Suardar, ST, S.Si
NIP. 197507051996031005





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

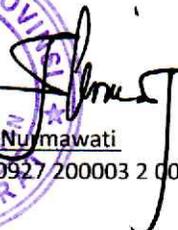
Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	325.228.838
			1.1.2 Kegiatan Pertemuan Harmonisasi PERDA KTR	146.448.838
			1.1.3 Monev PERDA KTR	178.780.000
Jumlah				325.228.838

Pihak Kedua

dr. Nurmawati
NIP. 19690927 200003 2 008

Pihak Pertama

Apriyani Laedini, SKM., M.Kes
NIP. 19680411 199003 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Surveilans dan Imunisasi
: 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1
3	Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh	Dokumen	1
4	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Dokumen	1
5	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan	Orang	1000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP	1,2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	171.805.000
			1.1.1 Pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke laboratorium rujukan nasional/regional (Surveilans rutin, sentinel, dan dugaan penyakit potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging/penyakit tidak lazim, media lingkungan, sampel PD3I, sampel ILI SARI) Rujukan DAK	171.805.000
			1,3 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	385.807.000
			1.2.1 Verifikasi sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE)/pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB atau Wabah/penyakit tidak lazim/investigasi kasus KPI, serta PE penyakit menular lainnya, PD3I, keracunan makanan dan penyehatan lingkungan DAK	85.807.000
			1.2.2 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Kader, Tokoh Masyarakat, Toko Agama dalam Penemuan Kasus Surveilans PD3I dan Penyakit Surveilans Lainnya	300.000.000
			1,4 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	75.328.000
			1,5 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	274.550.000
Jumlah				907.490.000





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari, Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD

UNIT KERJA

TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

: Bidang Pelayanan Kesehatan

: 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)	
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Capaian Universal Health Coverage (UHC)	Persen	100	
		Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persen	55	
		Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	Persen	45,4	
		Persentase FKTP Terakreditasi	Persen	55	
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persen	100	
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	: 1000 Rasio TT : 1000 Penduduk		2.1:1000
2		Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-KIS	Persen	95

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.439.993.590
Jumlah		14.439.993.590

Pihak Kedua

Dr. Penny Mayana Paisey, M.Si.
NIP. 19720501200212007

Pihak Pertama

Drs. Bhaktier, Apt.M.Kes
NIP. 196606191992031002



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
: 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Terlaksananya pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	3
2	Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1
3	Terlaksananya Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	1
4	Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1
5	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	2
6	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	2

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	500.000.000
			1.1.1 Pelayanan Kesehatan Bergerak	500.000.000
		2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.1 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	84.600.000
			2.2.1 Operasional Klinik Kantor Gubernur	84.600.000
			2.2 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	150.656.000
			2.3 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	75.328.000
			2.3.1 Movev Public Safety Center (PSC) 119	75.328.000
			3 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
		3.1.1 Movev ASPAK		75.328.000
		3.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		75.328.000
		3.2.1 movev peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	75.328.000	
Jumlah				961.240.000





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari, Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
: 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1
3	Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1
4	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	2
5	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-KIS	Persen	95

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1,1 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	193.577.127
			1.1.1 Operasional Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Papua Barat	3.881.127
			1.1.2 Pencanaan Program Masyarakat Orang Asli Papua Gratis Biaya Berobat	189.696.000
		2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.1 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.000.000.000
			2.1.1 Kontribusi Iuran PBI JK	8.000.000.000
			2.2 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	500.000.000
			2.2.1 Pembiayaan Rumah Sakit Jiwa	500.000.000
		3 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3,1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	75.328.000
			3.1.1 Pembinaan dan Pengawasan Sistem Rujukan Terintegrasi Papua Barat	63.948.000
3.1.2 Penyusunan Regulasi Dalam Rangka Pemetaan Sistem Rujukan Terintegrasi Papua Barat	11.380.000			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	4.1 Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	4.536.000.000	
		4.1.1 Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) OAP	4.536.000.000	
Jumlah				13.304.905.127





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	173.848.463
			1.1.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4.928.500
			1.1.2 Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Mendorong Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Kabupaten/Kota	168.919.963
Jumlah				173.848.463



Pihak Kedua

Drs. Bhaktar, Apt.M.Kes
NIP. 19660619 199203 1 002



Pihak Pertama

Efikasy, S.Sos
NIP. 19611210 200412 1 002



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Bidang Sumber Daya Kesehatan
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin	Dokumen	1
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	35
		Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	Orang	30
3	Meningkatnya Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persen	100
		Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persen	100

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.392.652.463
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.200.773.995
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	155.220.724
Jumlah		9.748.647.182



Pihak Kedua
dr. Ferry Mayoria Palsey, M.Si.
NIP. 19720501200212 007



Pihak Pertama
Yabira Salabai, SKM., M.Ke.
NIP. 19680708199503 1 002



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Kefarmasian
: 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang	Paket	1
2	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	1
3	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	3

No	Program	Kegiatan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1,1 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.218.148.000
2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan	1,1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	100.538.621
		2 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	2,1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	54.682.103
Jumlah				2.373.368.724



Jabak Kedua

Yahya Salabai, SKM., M. Kes
NIP. 196807081995031002



Jabak Pertama

Ika Bagus Windusara, S.Si., Apt
NIP. 198308132009091001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
: 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	2

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	174.504.463
			1.1.1 Monev Kalibrasi Alat Kesehatan Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Bagi OAP	99.176.463
			1.1.2 Monitoring Evaluasi Perijinan Alat Kesehatan dan PKRT Sebagai Dukungan Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi OAP	75.328.000
Jumlah				174.504.463

Pihak Kedua

Yehya Salibai, SKM., M.Kes
NIP: 19680708 199503 1 002

Pihak Pertama

Salome Salba, SKM
NIP: 19750402 200412 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari, Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	11
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1
3	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Orang	25

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	866.500.000
			1.2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000
		2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	2.1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	5.834.273.995
Jumlah				7.200.773.995

Pihak Kedua

Yahya Salaha, SKM., M.Kes
NIP. 19680708 199503 1 002

Pihak Pertama

Yohanis Mansim, S.Kep
NIP. 19830205 200412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI PAPUA BARAT
: 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	1

No	Program	Kegiatan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1,1 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1.090.380.000
			1.1.1 Bahan Repacking Distribusi Obat dan BMHP UPTD Farmasi Papua Barat	89.500.000
			1.1.2 Distribusi Obat, BMHP, dan Vaksin dari Provinsi ke Kab/Kota (UPTD Farmasi Papua Barat)	150.880.000
			1.1.3 Distribusi Obat, BMHP, dan Vaksin dari Provinsi ke Kab/Kota (UPTD Farmasi Papua Barat)	850.000.000
			Jumlah	1.090.380.000


Pibak Maltua
dr. FENNY M. PAISEY, M.Si
NIP. 19720501 200212 2 007


Pibak Pertama
Rahmawati, S.Si, M.Kes., Apt.
NIP. 19800214 200801 2 013



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI PAPUA BARAT
Seksi Analisi, Penerimaan, Distribusi dan Pengamanan
: 2024

TAHUN ANGGARAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	1

No	Program	Kegiatan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1,1 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 1.1.3 Distribusi Obat, BMHP, dan Vaksin dari Provinsi ke Kab/Kota (UPTD Farmasi Papua Barat)	850.000.000 850.000.000
Jumlah				850.000.000





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arafai, Manokwari. Kode Pos: 98315



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI PAPUA BARAT
Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Penyimpanan
: 2024

TAHUN ANGGARAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	11.900.000
				1.1.1 Pengadaan Thermometer Untuk UPTD Farmasi	11.900.000
				Jumlah	11.900.000



Pihak Kedua

Rahmawati S.Si., M.Kes., Apt.
NIP. 19800214 200801 2 013



Pihak Pertama

Amilodjin, S.Si, Apt
NIP. 19750717 200909 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI PAPUA BARAT
Sub Bagian Tata Usaha
: 2024

TAHUN ANGGARAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2024)
1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	1

No	Program	Kegiatan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1,1 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	240.380.000
			1.1.1 Bahan Repacking Distribusi Obat dan BMHP UPTD Farmasi Papua Barat	89.500.000
			1.1.2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	150.880.000
			Jumlah	240.380.000

Pihak Kedua

Rahmawati, S. Si, M.Kes., Apt.
NIP. 19800214 200801 2 013

Pihak Pertama

Anike Karolina Sanggemi, SE
NIP. 198041125 201104 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

Formulir E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
Periode Pelaksanaan: 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RKPd provinsi:

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi) (Akhir Periode RPJMD) (Target Program)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp											
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15																					
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kategori	853,442,423,772	Kategori	174,294,361,179	B	Kategori	102,292,006,267	Kategori	11,825,845,619	Kategori	16,190,931,804	Kategori	14,400,746,647	Kategori	37,762,125,032	B	Kategori	80,179,649,102	B	Kategori	254,474,010,281		Dinas Kesehatan									
	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kategori	853,442,423,772	Kategori	174,294,361,179	B	Kategori	102,292,006,267	Kategori	11,825,845,619	Kategori	16,190,931,804	Kategori	14,400,746,647	Kategori	37,762,125,032	B	Kategori	80,179,649,102	B	Kategori	254,474,010,281		Dinas Kesehatan									
	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kategori	274,771,542,719	Kategori	28,724,576,286	B	Kategori	41,883,708,264	Kategori	11,825,845,619	Kategori	7,348,883,215	Kategori	4,499,846,292	Kategori	12,304,882,197	B	Kategori	35,979,457,323	B	Kategori	64,704,033,609		Dinas Kesehatan								
	1	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	582,275,852	100	Persen	106,017,800	100	Persen	64,629,422	Persen	-	Persen	-	Persen	64,623,000	100	Persen	64,623,000	200	Persen	170,640,800		Dinas Kesehatan								
	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	156,693,053	1	Dokumen	33,858,300	0	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	33,858,300	25.00%	21.61%	Dinas Kesehatan								
	1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-KPD	4	Dokumen	191,957,549	1	Dokumen	44,535,000	1	Dokumen	29,629,422	Dokumen	0	Dokumen	29,629,000	1	Dokumen	29,629,000	2	Dokumen	74,164,000	50.00%	38.64%	Dinas Kesehatan								
	1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	233,625,250	1	Laporan	27,624,500	1	Laporan	35,000,000	Laporan	0	Laporan	34,994,000	1	Laporan	34,994,000	2	Laporan	62,618,500	50.00%	26.80%	Dinas Kesehatan								
	1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	158,860,620,408	100	Persen	13,624,552,555	100	Persen	38,799,912,192	Persen	11,417,275,894	Persen	6,435,926,058	Persen	3,978,248,934	Persen	11,070,235,433	100	Persen	32,901,686,319	200	Persen	46,526,238,874	Dinas Kesehatan						
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	411	Orang/ Bulan	147,888,584,341	104	Orang/ Bulan	11,499,333,547	104	Orang/ Bulan	36,621,286,048	104	Orang/ Bulan	11,045,152,714	104	Orang/ Bulan	6,043,406,658	104	Orang/ Bulan	3,587,504,334	104	Orang/ Bulan	10,403,752,933	104	Orang/ Bulan	31,079,816,499	208	Orang/ Bulan	42,579,150,046	50.61%	28.83%	Dinas Kesehatan
	1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	11,015,343,014	1	Dokumen	2,084,382,308	1	Dokumen	2,143,626,144	Dokumen	372,123,180	Dokumen	392,519,400	0	Dokumen	390,744,600	Dokumen	632,250,640	1	Dokumen	1,787,637,820	2	Dokumen	3,872,020,128	50.00%	35.15%	Dinas Kesehatan			
	1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	156,693,053	1	Laporan	40,836,700	1	Laporan	35,000,000	Laporan	0	Laporan	34,232,000	1	Laporan	34,232,000	2	Laporan	75,068,700	50.00%	47.91%	Dinas Kesehatan								
	1	02	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	313,386,106	100	Persen	360,641,182	100	Persen	29,629,422	Persen	-	Persen	-	Persen	-	Persen	29,260,000	100	Persen	29,260,000	200	Persen	389,901,182	Dinas Kesehatan						
	1	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	156,693,053	1	Dokumen	28,218,200	1	Dokumen	29,629,422	Dokumen	0	Dokumen	29,260,000	1	Dokumen	29,260,000	2	Dokumen	57,478,200	50.00%	36.68%	Dinas Kesehatan								
	1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	156,693,053	1	Laporan	332,422,982	0	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	1	Laporan	332,422,982	25.00%	212.15%	Dinas Kesehatan							
	1	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	3,892,573,810	100	Persen	733,881,729	100	Persen	64,629,422	Persen	-	Persen	-	Persen	64,259,000	Persen	-	100	Persen	64,259,000	200	Persen	798,140,729	Dinas Kesehatan						
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	12	Paket	2,609,025,868	2	Paket	356,332,000	0	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	2	Paket	356,332,000	16.67%	13.66%	Dinas Kesehatan							
	1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen	761,900,234	1	Dokumen	102,756,000	1	Dokumen	29,629,422	Dokumen	1	Dokumen	29,325,000	Dokumen	1	Dokumen	29,325,000	2	Dokumen	132,081,000	50.00%	17.34%	Dinas Kesehatan							
	1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	42,542,719	1	Dokumen	167,514,541	1	Dokumen	35,000,000	Dokumen	1	Dokumen	34,934,000	Dokumen	1	Dokumen	34,934,000	2	Dokumen	202,448,541	50.00%	475.87%	Dinas Kesehatan							
	1	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	720	Orang	479,104,989	180	Orang	107,279,188	0	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	180	Orang	107,279,188	25.00%	22.39%	Dinas Kesehatan							
	1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	26,190,068,308	100	Persen	8,364,168,324	100	Persen	1,183,918,885	Persen	312,346,554	Persen	620,659,158	Persen	41,835,180	Persen	208,673,400	100	Persen	1,183,514,292	200	Persen	9,547,682,616	Dinas Kesehatan						
	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	293,088,500	1	Paket	124,315,000	1	Paket	71,400,000	Paket	7,640,000	Paket	7,640,000	Paket	63,760,000	1	Paket	71,400,000	2	Paket	195,715,000	50.00%	66.78%	Dinas Kesehatan						
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	1,827,024,681	2	Paket	870,715,000	0	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	2	Paket	870,715,000	25.00%	47.66%	Dinas Kesehatan							
	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	165,000,000	1	Paket	165,000,000	0	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	1	Paket	165,000,000	25.00%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan							

	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	837,797,603	1	Paket	298,256,775	1	Paket	175,000,000		Paket	90,403,000	0	Paket		Paket	84,597,000	1	Paket	175,000,000	2	Paket	473,256,775	50.00%	56.49%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	761,670,162	2	Paket	224,460,824	1	Paket	75,000,000		Paket	31,771,000	0	Paket	12,000,000	Paket	31,229,000	1	Paket	75,000,000	3	Paket	299,460,824	75.00%	39.32%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20	Dokumen	737,031,375	1	Dokumen	659,586,310	0	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		0	Dokumen	-	1	Dokumen	659,586,310	5.00%	89.49%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket		1	Paket	22,500,000	0	Paket	-	Paket		Paket		Paket		Paket		0	Paket	-	1	Paket	22,500,000	25.00%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	Laporan	1,046,196,641	1	Laporan	520,027,200	1	Laporan	110,292,805	Laporan		Laporan	93,016,333	Laporan	17,250,000	Laporan		1	Laporan	110,266,333	2	Laporan	630,293,533	50.00%	60.25%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	20,687,259,346	1	Laporan	5,479,307,215	1	Laporan	752,226,000	Laporan	312,346,554	Laporan	397,828,825	Laporan	12,585,180	Laporan	29,087,400	1	Laporan	751,847,559	2	Laporan	6,231,155,174	50.00%	30.12%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	66,079,966,914	100	Persen	2,394,298,000	0	Persen	-	Persen	-	Persen	-	Persen	-	Persen	-	0	Persen	-	100	Persen	2,394,298,000			Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	Unit	10,775,312,500	2	Unit	1,493,728,000	0	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		0	Unit	-	2	Unit	1,493,728,000	25.00%	13.86%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Paket		1	Paket	98,500,000	0	Paket	-	Paket		Paket		Paket		Paket		0	Paket	-	1	Paket	98,500,000	25.00%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	55,304,654,414	1	Unit	802,070,000	0	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		0	Unit	-	1	Unit	802,070,000	33.33%	1.45%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	9,558,981,365	100	Persen	991,902,870	100	Persen	860,829,249	Persen	96,223,171	Persen	174,543,901	Persen	204,026,285	Persen	382,931,584	100	Persen	857,724,941	200	Persen	1,849,627,811			Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	277,356,543	1	Laporan	55,250,000	0	Laporan	-	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		0	Laporan	-	1	Laporan	55,250,000	25.00%	19.92%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	6,714,495,474	1	Laporan	616,941,021	1	Laporan	766,837,400	Laporan	96,223,171	Laporan	129,193,901	0	Laporan	204,026,285	Laporan	334,291,584	1	Laporan	763,734,941	2	Laporan	1,380,675,962	50.00%	20.56%	Dinas Kesehatan			
	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	2,567,129,348	1	Laporan	319,711,849	1	Laporan	92,991,849	Laporan		Laporan	45,350,000	Laporan		Laporan	48,640,000	1	Laporan	93,990,000	2	Laporan	413,701,849	50.00%	16.12%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	9,293,669,956	100	Persen	2,149,113,826	100	Persen	880,159,672	Persen	-	Persen	117,754,098	Persen	211,476,893	Persen	549,158,780	100	Persen	878,389,771	200	Persen	3,027,503,597			Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	84	Unit	4,526,927,365	21	Unit	427,672,576	21	Unit	349,906,200	Unit		Unit	97,659,098	Unit	172,951,893	Unit	77,574,400	21	Unit	348,185,391	42	Unit	775,857,967	50.00%	17.14%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	236	Unit	1,810,770,940	59	Unit	587,325,000	59	Unit	360,323,472	Unit		Unit		Unit		Unit	360,319,380	59	Unit	360,319,380	118	Unit	947,644,380	50.00%	52.33%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	664	Unit	860,731,962	166	Unit	193,640,000	191	Unit	169,930,000	Unit		Unit	20,095,000	Unit	38,525,000	Unit	111,265,000	191	Unit	169,885,000	357	Unit	363,525,000	53.77%	42.23%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	2,095,239,689	1	Unit	940,476,250	0	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		0	Unit	-	1	Unit	940,476,250	25.00%	44.89%	Dinas Kesehatan				
	1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			Unit		0	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		0	Unit	-	0	Unit		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan				
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak yang dilaksanakan Persentase Puskesmas Tersedia Obat Esensial Persentase Alat Kesehatan yang digunakan Sesuai Standar Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Kabupaten Persen Sarana Persen Rasio TT : Pdd	344,062,241,441	Kabupaten Persen Sarana Persen Rasio TT : Pdd	138,128,886,399	100	Kabupaten Persen Sarana Persen Rasio TT : Pdd	70 45.40 2.1:100	49,318,942,384	Kabupaten Persen Sarana Persen Rasio TT : Pdd	5,248,013,732	Kabupaten Persen Sarana Persen Rasio TT : Pdd	9,464,915,489	Kabupaten Persen Sarana Persen Rasio TT : Pdd	19,354,748,036	0	Kabupaten Persen Sarana Persen Rasio TT : Pdd	34,067,677,257	0	Kabupaten Persen Sarana Persen Rasio TT : Pdd	172,196,563,656						Dinas Kesehatan				
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	151,169,596,735	100	Persen	96,376,101,824	100	Persen	25,706,944,923	Persen		Persen	798,244,998	Persen	4,423,674,183	Persen	9,187,175,129	100	Persen	14,409,094,310	200	Persen	110,785,196,134			Dinas Kesehatan				
	1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4	Unit	13,381,206,464	1	Unit	21,141,556,500	0	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		0	Unit	-	1	Unit	21,141,556,500	25.00%	157.99%	Dinas Kesehatan				
	1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Unit			Unit		0	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		0	Unit	-	0	Unit		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan				
	1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulu, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulu, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	12	Layanan	4,310,125,000	5	Layanan	2,987,330,560	2	Layanan	500,000,000	Layanan		Layanan	497,966,498	Layanan		Layanan		2	Layanan	497,966,498	7	Layanan	3,485,297,058	58.33%	80.86%	Dinas Kesehatan				
	1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	4	Unit	6,465,187,500	1	Unit	278,924,499	0	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		0	Unit	-	1	Unit	278,924,499	25.00%	4.31%	Dinas Kesehatan				
	1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	4	Unit	2,155,062,500	5	Unit	748,782,000	1	Unit	1,807,450,000	Unit		Unit	89,577,000	Unit	652,100,000	Unit	1,060,991,000	1	Unit	1,802,668,000	6	Unit	2,551,450,000	150.00%	118.39%	Dinas Kesehatan				
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4	Unit	4,310,125,000	20	Unit	2,891,437,969	6	Unit	2,500,000,000	Unit		Unit		Unit		Unit	1,026,700,000		0	Unit	1,026,700,000	3	Unit	2,105,070,000	23	Unit	4,996,507,969	575.00%	115.92%	Dinas Kesehatan

						1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	40	Unit	697,000,000		Unit	0	Unit	-	Unit	Unit	0	Unit	-	0	Unit	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan							
						1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40	Unit	818,923,750		Unit	0	Unit	-	Unit	Unit	0	Unit	-	0	Unit	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan							
						1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	8	Unit	2,155,062,500	429,681,237	0	Unit	-	Unit	Unit	0	Unit	-	0	Unit	429,681,237	0.00%	19.94%	Dinas Kesehatan								
						1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4	Dokumen	9,355,824,550	2,203,808,100	1	Dokumen	1,689,890,000	Dokumen	199,598,500	0	Dokumen	552,444,910	Dokumen	937,119,890	1	Dokumen	1,689,163,300	1	Dokumen	3,892,971,400	25.00%	41.61%	Dinas Kesehatan			
						1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk	1	Unit	93,242,437,030	63,836,590,529	1	Unit	16,991,456,923	Unit	0	Unit	1,553,117,100	Unit	5,413,764,900	1	Unit	6,966,882,000	1	Unit	70,803,472,529	100.00%	75.93%	Dinas Kesehatan				
						1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	8	Paket	14,278,642,441	1,857,990,430	1	Paket	2,218,148,000	Paket	11,103,000	Paket	639,312,173	Paket	696,929,339	1	Paket	1,347,344,512	1	Paket	3,205,334,942	12.50%	22.45%	Dinas Kesehatan				
						1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	177,120,617,834	38,663,098,140	100	Persen	21,775,504,135	Persen	4,327,966,100	Persen	4,044,035,643	Persen	9,549,948,840	100	Persen	17,921,950,583	200	Persen	56,585,048,723			Dinas Kesehatan				
						1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	6000	Orang	2,155,062,500	500	Orang	1,504,329,000	1000	Orang	2,500,000,000	Orang	1,117,090,243	Orang	30,000,000	1000	Orang	1,147,090,243	1500	Orang	2,651,419,243	25.00%	123.03%	Dinas Kesehatan				
						1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600	Orang	2,155,062,500	19057	Orang	402,225,000	1000	Orang	1,780,838,250	Orang	413,950,000	Orang	743,447,600	85718	Orang	1,157,397,600	104775	Orang	1,559,622,600	17462.50%	72.37%	Dinas Kesehatan				
						1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	4	Dokumen	3,629,917,422	1	Dokumen	797,554,500	1	Dokumen	713,550,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen	663,036,860	1	Dokumen	663,036,860	2	Dokumen	1,460,591,360	50.00%	40.24%	Dinas Kesehatan		
						1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	4	Dokumen	1,978,758,559	1	Dokumen	185,879,375	1	Dokumen	75,328,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen	74,040,000	1	Dokumen	74,040,000	2	Dokumen	259,919,375	50.00%	13.14%	Dinas Kesehatan		
						1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	4	Dokumen	1,978,758,559	1	Dokumen	228,162,804	1	Dokumen	75,328,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen	75,264,000	1	Dokumen	75,264,000	2	Dokumen	303,426,804	50.00%	15.33%	Dinas Kesehatan		
						1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	Dokumen	22,385,000,000	1	Dokumen	2,789,955,045	1	Dokumen	2,066,106,039	Dokumen		Dokumen	1,538,631,600	Dokumen	164,084,800	1	Dokumen	1,702,716,400	2	Dokumen	4,492,671,445	50.00%	20.07%	Dinas Kesehatan		
						1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	Dokumen	2,065,536,951	1	Dokumen	413,782,241	1	Dokumen	116,078,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen	107,937,300	1	Dokumen	107,937,300	2	Dokumen	521,719,541	50.00%	25.26%	Dinas Kesehatan		
						1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	Dokumen	2,065,536,951		Dokumen		1	Dokumen	99,237,916	Dokumen		Dokumen		Dokumen	98,313,316	1	Dokumen	98,313,316	1	Dokumen	98,313,316	25.00%	4.76%	Dinas Kesehatan		
						1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	Dokumen	1,422,341,110		Dokumen		1	Dokumen	250,000,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen	246,468,000	1	Dokumen	246,468,000	1	Dokumen	246,468,000	25.00%	17.33%	Dinas Kesehatan		
						1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4	Dokumen	1,114,078,319	1	Dokumen	68,790,000	1	Dokumen	173,848,463	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	168,852,800	1	Dokumen	168,852,800	2	Dokumen	237,642,800	50.00%	21.33%	Dinas Kesehatan		
						1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	Dokumen	44,825,300,000	1	Dokumen	3,392,013,723	1	Dokumen	1,197,789,000	Dokumen		Dokumen	178,242,800	Dokumen	65,460,000	Dokumen	775,471,638	1	Dokumen	1,019,174,438	2	Dokumen	4,411,188,161	50.00%	9.84%	Dinas Kesehatan
						1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	4	Dokumen	1,114,078,319	1	Dokumen	153,946,420	0	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		0	Dokumen	-	1	Dokumen	153,946,420	25.00%	13.82%	Dinas Kesehatan		
						1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4	Dokumen	862,025,000		Dokumen		0	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan		
						1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	Dokumen	37,021,652,413	1	Dokumen	7,748,807,000	1	Dokumen	8,521,319,000	Dokumen		Dokumen	3,919,648,300	Dokumen		Dokumen	3,968,934,576	1	Dokumen	7,888,582,876	2	Dokumen	15,637,389,876	50.00%	42.24%	Dinas Kesehatan
						1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	Dokumen	2,521,078,315	1	Dokumen	2,141,187,528	1	Dokumen	614,630,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen	291,938,000	Dokumen	72,865,600	1	Dokumen	364,803,600	2	Dokumen	2,505,991,128	50.00%	99.40%	Dinas Kesehatan
						1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	4	Dokumen	1,158,323,334		Dokumen		1	Dokumen	384,112,000	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	127,226,000	Dokumen	211,957,510	1	Dokumen	339,183,510	1	Dokumen	339,183,510	25.00%	29.28%	Dinas Kesehatan
						1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4	Dokumen	10,162,262,268	1	Dokumen	8,306,178,702	1	Dokumen	1,374,070,127	Dokumen		Dokumen	25,468,600	Dokumen	1,318,265,700	1	Dokumen	1,343,734,300	2	Dokumen	9,649,913,002	50.00%	94.96%	Dinas Kesehatan		
						1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	4	Dokumen	1,114,811,971		Dokumen		1	Dokumen	150,656,000	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	131,403,400	Dokumen		Dokumen	131,403,400	1	Dokumen	131,403,400	25.00%	11.79%	Dinas Kesehatan	
						1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	4	Dokumen	928,090,596		Dokumen		0	Dokumen	75,328,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan		

	1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4	Unit	8,620,250,000	1	Unit	285,381,926	1	Unit	65,015,000	Unit			Unit		1	Unit	64,015,000	Unit		1	Unit	64,015,000	2	Unit	349,396,926	50.00%	4.05%	Dinas Kesehatan				
	1	02	02	1.02	0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	Dokumen	21,550,625,000	1	Dokumen	152,162,665	1	Dokumen	339,379,740	Dokumen		Dokumen		Dokumen		183,254,740	1	Dokumen	183,254,740	2	Dokumen	335,417,405	50.00%	1.56%	Dinas Kesehatan							
	1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4	Paket	431,012,500	1	Paket	66,071,000	1	Paket	204,300,000	Paket		Paket		Paket		148,938,000	1	Paket	148,938,000	2	Paket	215,000,000	50.00%	49.88%	Dinas Kesehatan							
	1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	4	Dokumen	3,482,540,483	1	Dokumen	10,026,671,211	1	Dokumen	998,596,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		230,075,000	Dokumen	100,000,000	Dokumen	667,669,200	1	Dokumen	997,744,200	2	Dokumen	11,024,415,411	50.00%	316.56%	Dinas Kesehatan			
	1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2E-05	Keluarga	2,378,514,764	Keluarga		0	Keluarga	-	Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga		0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan				
	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	Persen	2,182,380,957	Persen		100	Persen	563,441,337	Persen		Persen		Persen		Persen		180,110,000	Persen	368,192,762	100	Persen	548,302,762	100	Persen	548,302,762				Dinas Kesehatan			
	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4	Dokumen	2,182,380,957	Dokumen		1	Dokumen	563,441,337	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		180,110,000	Dokumen	368,192,762	1	Dokumen	548,302,762	1	Dokumen	548,302,762	25.00%	25.12%	Dinas Kesehatan				
	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	4,075,586,859	Persen		100	Persen	384,608,463	Persen		Persen		Persen		Persen		205,874,063	Persen	129,479,000	100	Persen	335,353,063	100	Persen	1,506,430,656				Dinas Kesehatan			
	1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2	Unit	1,358,528,953	Unit		0	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan				
	1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2	Unit	1,358,528,953	Unit		2	Unit	146,533,200	Unit		Unit		Unit		Unit		58,219,800	Unit	40,395,200	2	Unit	98,615,000	2	Unit	98,615,000	100.00%	7.26%	Dinas Kesehatan				
	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2	Unit	1,358,528,953	1	Unit	1,171,077,593	2	Unit	238,075,263	Unit		Unit		Unit		Unit		147,654,263	Unit	89,083,800	2	Unit	236,738,063	3	Unit	1,407,815,656	150.00%	103.63%	Dinas Kesehatan			
	1	02	02	4.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	9,514,059,056	Persen		100	Persen	1,918,608,842	100	Persen	888,443,526	Persen		Persen		121,802,634	Persen	611,221,600	Persen	119,952,305	100	Persen	852,976,539	100	Persen	2,771,585,381				Dinas Kesehatan		
	1	02	02	4.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	Dokumen	2,378,514,764	1	Dokumen	546,997,000	1	Dokumen	391,445,280	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen	377,190,000	Dokumen	1	Dokumen	377,190,000	2	Dokumen	924,187,000	50.00%	38.86%	Dinas Kesehatan		
	1	02	02	4.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	Dokumen	2,378,514,764	1	Dokumen	394,802,100	1	Dokumen	238,562,846	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen	234,031,600	Dokumen	1	Dokumen	234,031,600	2	Dokumen	628,833,700	50.00%	26.44%	Dinas Kesehatan		
	1	02	02	4.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	Dokumen	2,378,514,764	1	Dokumen	593,319,742	1	Dokumen	258,435,400	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		121,802,634	Dokumen	119,952,305	1	Dokumen	241,754,939	2	Dokumen	835,074,681	50.00%	35.11%	Dinas Kesehatan			
	1	02	02	4.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	Dokumen	2,378,514,764	1	Dokumen	383,490,000	0	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		0	Dokumen	-	1	Dokumen	383,490,000	25.00%	16.12%	Dinas Kesehatan						
	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASTAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	14	Persen	223,558,000,000	Persen		0	Persen	5,176,895,058	0	Persen	9,936,477,995	Persen		Persen		3,594,034,857	Persen	435,984,866	Persen	5,040,730,549	0	Persen	9,070,750,272	0	Persen	14,247,645,330				Dinas Kesehatan		
	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	100	Persen	53,875,345,233	Persen		0	Persen	-	Persen		Persen		Persen		Persen		-	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-				Dinas Kesehatan			
	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	200	Orang	10,774,095,233	Orang		0	Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan				
	1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	200	Orang	43,101,250,000	Orang		0	Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan				
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	100	Persen	88,582,654,767	64	Persen	650,708,494	100	Persen	1,366,500,000	Persen		Persen		Persen		Persen		80,916,400	Persen	136,780,147	Persen	672,090,896	100	Persen	889,787,443	164	Persen	1,540,495,937				Dinas Kesehatan
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	40	Orang	86,202,500,000	3	Orang	199,500,000	13	Orang	866,500,000	Orang		Orang		Orang		Orang		80,916,400	Orang	70,000,000	Orang	586,835,160	10	Orang	737,751,560	13	Orang	937,251,560	32.50%	1.09%	Dinas Kesehatan	
	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	Dokumen	2,380,154,767	1	Dokumen	451,208,494	1	Dokumen	500,000,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		66,780,147	Dokumen	85,255,736	1	Dokumen	152,035,883	2	Dokumen	603,244,377	50.00%	25.34%	Dinas Kesehatan			
	1	02	03	4.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		100		70,000,000,000	62		2,329,552,964			4,833,977,995							1,656,042,257		299,204,719		1,743,812,581	0		3,699,059,557	62		6,028,612,521				Dinas Kesehatan		
	1	02	03	4.02	0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	40	Orang	70,000,000,000	18	Orang	2,329,552,964	25	Orang	4,033,977,995	Orang		Orang		Orang		Orang		1,656,042,257	Orang	299,204,719	Orang	1,743,812,581	16	Orang	3,699,059,557	34	Orang	6,028,612,521	85.00%	8.61%	Dinas Kesehatan	
	1	02	03	4.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	100	Persen	11,100,000,000	100	Persen	2,196,633,600	100	Persen	4,536,000,000	Persen		Persen		Persen		Persen		1,857,076,200	Persen	-	Persen	2,624,827,072	100	Persen	4,481,903,272	200	Persen	6,678,536,872				Dinas Kesehatan
	1	02	03	4.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	40000	Orang	11,100,000,000	9101	Orang	2,196,633,600	10000	Orang	4,536,000,000	Orang		Orang		Orang		Orang		1,857,076,200	Orang	2,624,827,072	10229	Orang	4,481,903,272	19330	Orang	6,678,536,872	48.33%	60.17%	Dinas Kesehatan			
	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	100	Persen	2,874,639,612	Persen		100	Persen	155,220,724	Persen		Persen		Persen		Persen		-	Persen	-	Persen	111,834,400	100	Persen	111,834,400	100	Persen	111,834,400				Dinas Kesehatan	

1	02	04	1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Terlaksananya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	12	Sarana	1,916,459,418		Sarana		3	Sarana	100,538,621		Sarana		Sarana		Sarana	65,976,800	1	Sarana	65,976,800	1	Sarana	65,976,800				Dinas Kesehatan		
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Perizinan	12	Sarana	1,916,459,418	0	Sarana		3	Sarana	100,538,621		Sarana		Sarana		Sarana	65,976,800	1	Sarana	65,976,800	1	Sarana	65,976,800	8.33%	3.44%		Dinas Kesehatan	
1	02	04	1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100	Persen	958,180,194		Persen		100	Persen	54,682,103		Persen		Persen		Persen	45,857,600	100	Persen	45,857,600	100	Persen	45,857,600				Dinas Kesehatan		
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	4	Sarana	958,180,194	0	Sarana		1	Sarana	54,682,103		Sarana		Sarana		Sarana	45,857,600	1	Sarana	45,857,600	1	Sarana	45,857,600	25.00%	4.79%		Dinas Kesehatan	
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kabupaten		8,176,000,000		Kabupaten	2,264,003,436	4	Kabupaten	997,656,900		Kabupaten		Kabupaten		Kabupaten	949,929,850	4	Kabupaten	949,929,850	4	Kabupaten	3,213,933,286				Dinas Kesehatan		
1	02	05	1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	3,482,540,483		Persen	498,008,423	100	Persen	222,328,900		Persen		Persen		Persen	208,836,900	100	Persen	208,836,900	100	Persen	706,845,323				Dinas Kesehatan		
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4	Dokumen	3,482,540,483	1	Dokumen	498,008,423	1	Dokumen	222,328,900		Dokumen		Dokumen		Dokumen	208,836,900	1	Dokumen	208,836,900	2	Dokumen	706,845,323	50.00%	20.30%		Dinas Kesehatan	
1	02	05	1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	2,827,449,404		Persen		100	Persen	75,328,000		Persen		Persen		Persen	74,433,750	100	Persen	74,433,750	100	Persen	74,433,750				Dinas Kesehatan		
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4	Dokumen	1,867,240,109		Dokumen		1	Dokumen	75,328,000		Dokumen		Dokumen		Dokumen	74,433,750	1	Dokumen	74,433,750	1	Dokumen	74,433,750	25.00%	3.99%		Dinas Kesehatan	
1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4	Dokumen	960,209,295		Dokumen		0	Dokumen			Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0.00%	0.00%		Dinas Kesehatan
1	02	05	1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	1,866,010,113	100	Persen	1,765,995,013	100	Persen	700,000,000		Persen		Persen		Persen	666,659,200	100	Persen	666,659,200	200	Persen	2,432,654,213				Dinas Kesehatan		
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	4	Dokumen	1,866,010,113	1	Dokumen	1,765,995,013	1	Dokumen	700,000,000		Dokumen		Dokumen		Dokumen	666,659,200	1	Dokumen	666,659,200	2	Dokumen	2,432,654,213	50.00%	130.37%		Dinas Kesehatan	
														102,292,006,267			11,825,845,619			16,190,931,804			14,400,746,647			37,762,125,032			80,179,649,102			78.38%	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Komitmen dari tiap bidang teknis untuk menyelesaikan kegiatan di TW IV

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Proses pengujian TU terbatas, proses tender kegiatan fisik cukup lama, pergantian pimpinan, penambahan 10 Milyar pada APBD perubahan untuk pembangunan lanjutan gedung KUSU tidak bisa dilaksanakan karena terkendala waktu/proses tender dan pengerjaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan karena APBD perubahan baru ditetapkan tanggal 18 November 2024.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*): Pelaksanaan kegiatan lebih awal sejak DPA induk ditetapkan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja


 Kepala Dinas Kesehatan
 Provinsi Papua Barat
dr. Alwan Rimosan, Sp.B.Finacs
 NIP. 19691027 200012 1 004



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 000.1/2660.a/DK-PB/X/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2023-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan uruf b telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program – program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
 - d. bahwa berdasarkan peetimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan BAB I PENDAHULUAN | I-3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan pelaksanaan Kebijakan Otonomi Provinsi Papua;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Papua Barat 2006-2025;
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Manokwari
Pada Tanggal, 20 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat

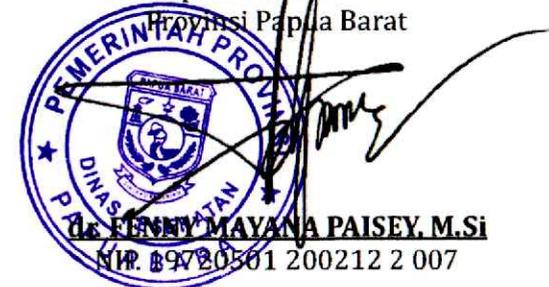

Dr. PENNY MAYANA PAISEY, M.Si
NIP. 19720501 200212 2 007

LAMPIRAN : I
 NOMOR : 000.1/2660.a/DK-PB/X/2023
 TANGGAL : 20 Oktober 2023
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT 2023-2026

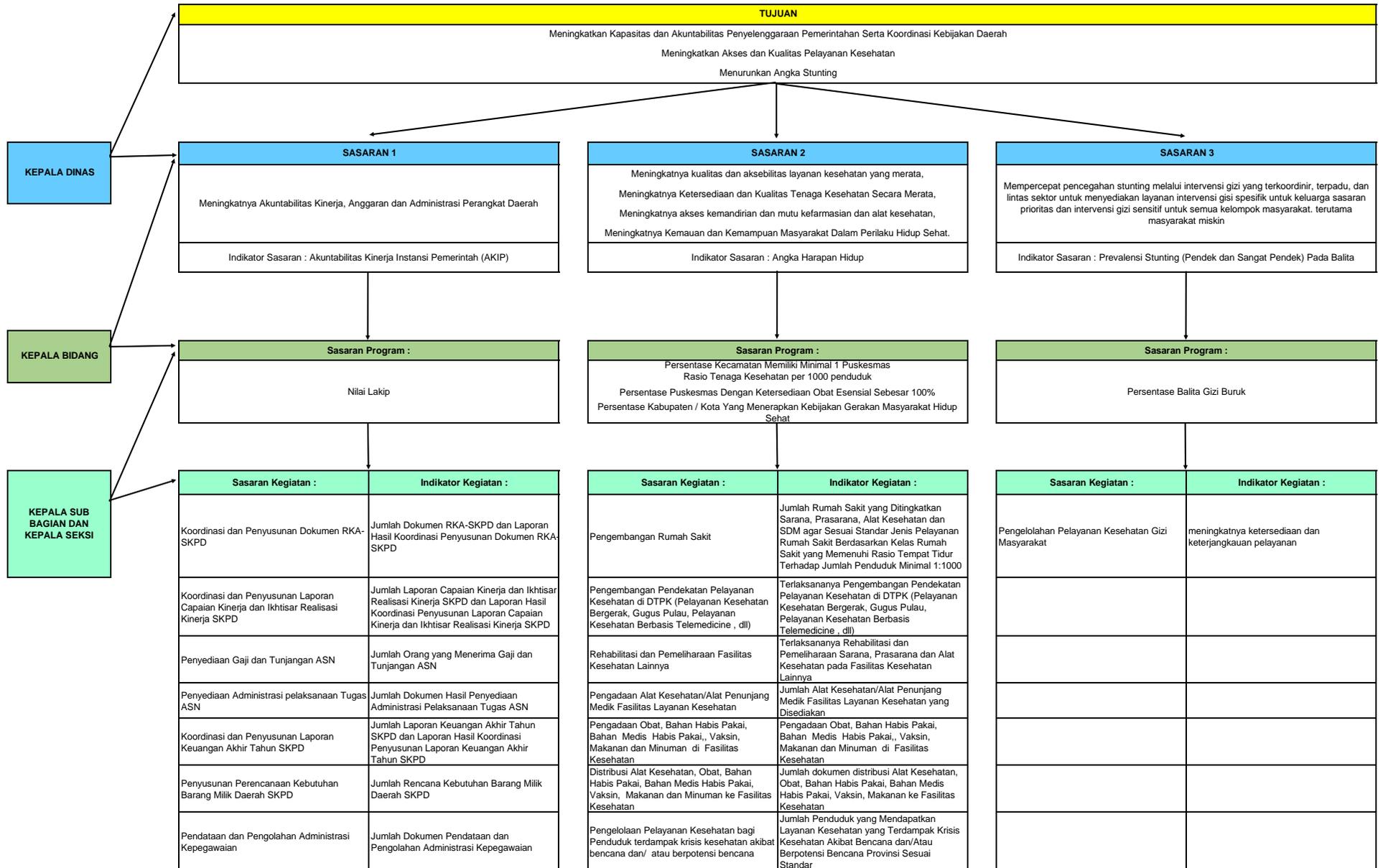
No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
				2023	2024	2025	2026	
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	65.78	66.04	66.31	66.57	66.84	66.84
2	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	Persen	75.00%	75.50%	83.11%	91.32%	100%	100%
3	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	Per 1000 Penduduk	10.45 per 1000 penduduk	10.50 per 1000 penduduk	10.55 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk
4	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	Persen	78.33%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	42.85%	46.15%	61.54%	79.92%	100%	100%
6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	30%	26%	22%	18%	14%	14%
7	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	10.05%	8.5%	7.5%	7.2%	6.9%	6.9%

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
 Provinsi Papua Barat



Dr. FENNY MAYANA PAISEY, M.Si
 NIP. 89720501 200212 2 007

**POHON KINERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2024**



CASCADING
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Penanggung jawab	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Lakip	%	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.883.708.264	Nilai Lakip				
					1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.629.422	Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	
					1,1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29.629.422	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
					1,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.799.912.192	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		
					1,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.621.286.048	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	105	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,2	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	2.143.626.144	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.629.422	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	
					1,1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	29.629.422	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.629.422	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	
					1,1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.629.422	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
					1,2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35.000.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

					5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.183.918.885	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	
					1,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	71.400.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
					1,2	Penyediaan bahan logistik kantor	175.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,3	penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	75.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.292.885	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	752.226.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	860.829.249	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	
					1,1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	766.837.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,2	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	93.991.849	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.159.672	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	
					1,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	349.906.200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	169.930.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	191	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.323.472	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	59	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		47.252.841.745	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan			
					1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	25.706.944.923	Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	

					1,1	Pengembangan Rumah Sakit	16.991.456.923	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,2	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	500.000.000	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Layanan	3	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
					1,3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.807.450.000	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.500.000.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	3	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.218.148.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Paket	1	Seksi Kefarmasian
					1,6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1.689.890.000	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	1	UPTD Farmasi
					2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	19.709.403.496	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	
					1,1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	2.500.000.000	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	1000	Seksi Imunisasi dan Surveilans
					1,2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.780.838.250	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1000	Seksi Imunisasi dan Surveilans & Seksi Kefarmasian
					1,3	pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu dan anak	713.550.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	Seksi Kesga dan Gizi

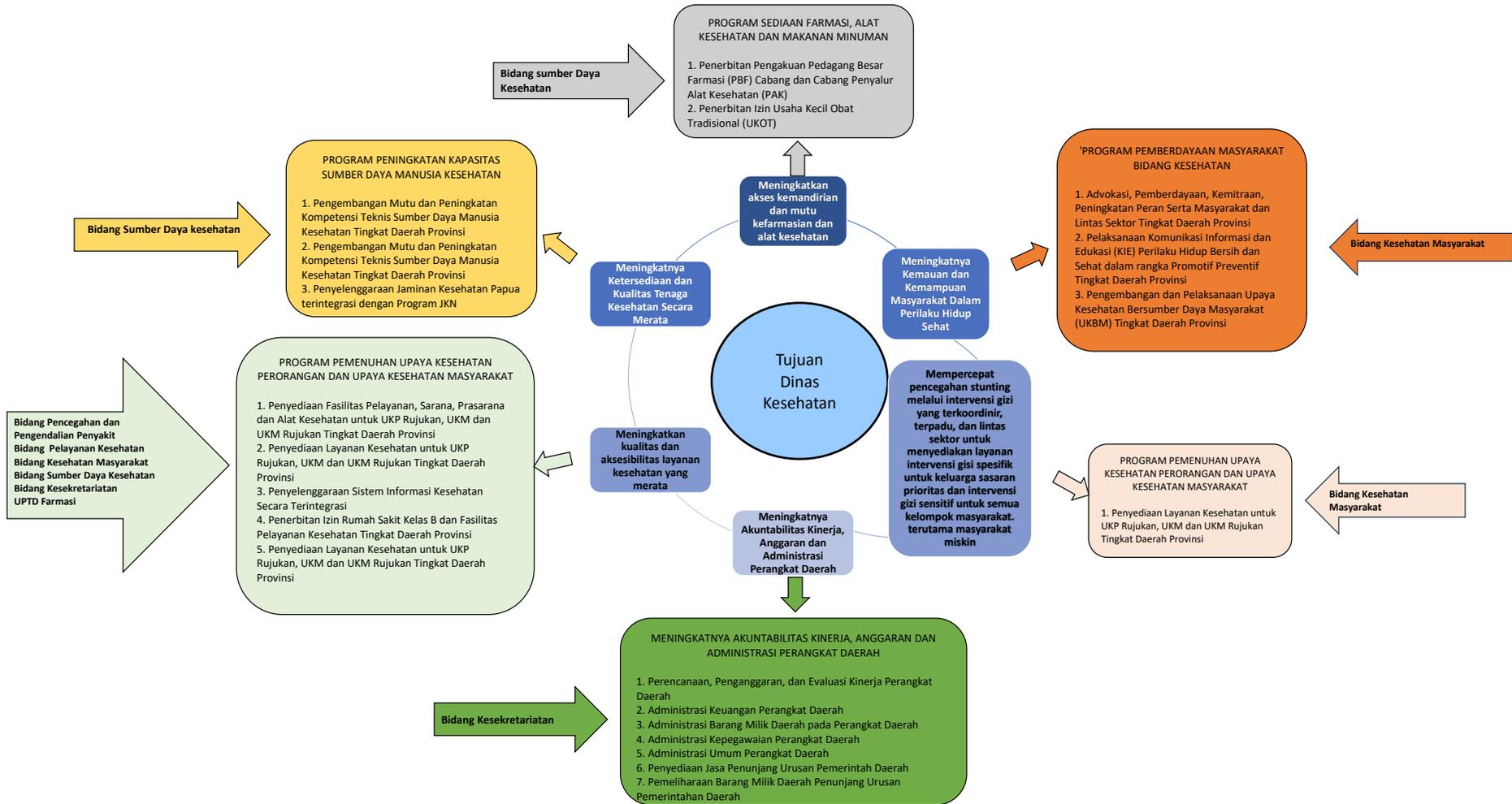
					1,4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1	Seksi Kesga dan Gizi
					1,5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1	Seksi Kesga dan Gizi
					1,6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	116.078.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
					1,7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	99.237.916	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
					1,8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
					1,9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	173.848.463	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
					1,10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.197.789.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	1	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Seksi PTM dan Seksi Surveilans & Imunisasi
					1,11	Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	8.521.319.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
					1,12	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	614.630.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	Seksi Surveilans & Imunisasi
					1,13	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	384.112.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
					1,14	Pembinaan Pelaksanaan Upaya pelayanan Kesehatan	1.374.070.127	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset, Seksi Sumber Daya Kesehatan Masyarakat dan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
					1,15	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	150.656.000	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	1	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
					1,16	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Seksi Surveilans & Imunisasi
					1,17	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	65.015.000	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
					1,18	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	339.379.740	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

					1,19	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	204.300.000	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	Seksi Surveilans & Imunisasi
					1,20	Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan	998.596.000	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	563.441.337				
					1,1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	563.441.337	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
					4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	384.608.463	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	
					1,1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	146.533.200	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	2	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
					1,2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	238.075.263	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	2	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan PKRT
					5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	888.443.526	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	
					1,1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	391.445.280	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1	Seksi Pengendalian & Pencegahan Penyakit Menular
					1,2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	238.562.846	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1	Seksi Pengendalian & Pencegahan Penyakit Menular
					1,3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	258.435.400	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1	Seksi Pengendalian & Pencegahan Penyakit Menular
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	%	100		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9.936.477.995	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	14	
					1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.366.500.000	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	%	100	
					1,1	peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan	866.500.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	10	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
					1,2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

					2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	4.033.977.995	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	%	100	
					1,1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	4.033.977.995	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Orang	25	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
					3	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	4.536.000.000	Persentase Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	%	100	
					1,1	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	4.536.000.000	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Orang	10000	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
4	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	%	100		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	155.220.724	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	%	100	
					1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100.538.621	Persentase Terlaksananya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	%	100	
					1,1	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang PAK	100.538.621	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	3	Seksi kefarmasian
					2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	54.682.103	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	%	100	
					1,1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	54.682.103	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	1	Seksi kefarmasian
5	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	%	100		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	997.656.900	Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif	%	40	
					1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	222.328.900	Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	%	100	
					1,1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan, Penggalangan kemitraan, peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Provinsi	222.328.900	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas pemberdayaan masyarakat	Dokumen	1	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

					2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	75.328.000				
					1,1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
					3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	700.000.000	Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	%	100	
					1,1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1	Seksi Kesga dan Gizi
6	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin	Persentase Balita Gizi Buruk	%	100		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.066.100.639	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi	%	100	
					1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.066.100.639	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	
					1,1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.066.100.639	meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan	Dokumen	1	Seksi Kesga dan Gizi

CROSS CUTTING DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024



**RENCANA AKSI
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan												Penanggung jawab									
										Target				TW 1				TW 2					TW 3				TW 4				
										TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Lakip	%	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.883.708.264	Nilai Lakip																								
					1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.629.422	Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100																					
					1,1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29.629.422	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1																				Sub Bagian Program, Informasi dan Humas	
					1,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1																				Sub Bagian Program, Informasi dan Humas	
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.799.912.192	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%																						
					1,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.621.286.048	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	105																					Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,2	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	2.143.626.144	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1																					Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1																					Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.629.422	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100																					
					1,1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	29.629.422	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1																					Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.629.422	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100																					
					1,1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.629.422	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1																					Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
					1,2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35.000.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1																					Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
					5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.183.918.885	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100																					
					1,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	71.400.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1																					Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
					1,2	Penyediaan bahan logistik kantor	175.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1																					Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,3	penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	75.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1																					Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.292.885	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1																					Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	752.226.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1																					Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	860.829.249	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100																					
					1,1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	766.837.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1																					Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,2	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	93.991.849	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1																					Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERIODE TAHUN 2017 - Agustus 2024**

NO	TAHUN PEROLEHAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	PRESTASI YANG DICAPAI	NOMOR KEPUTUSAN	WAKTU PENETAPAN	DITETAPKAN OLEH	JABATAN	BENTUK PENGHARGAAN	GAMBAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2017	Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja	Pencapaian dalam Kategori Jumlah Pemeriksaan IVA Test Tertinggi pada Wilayah Indonesia Timur		Jakarta, 25 April 2017	Hj. Iriana Joko Widodo dan Hj. Mufidah Jusuf Kalla	Pembina Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja	Sertifikat	
2	2018	Museum Rekor - Dunia Indonesia	Rekor Penyelenggara Pemantauan Penggunaan Kelambu Anti Nyamuk secara Serentak dengan Jumlah Terbanyak	No.8435/R.MURI/IV/2018	Jakarta, 29 April 2018	Jaya Suprana	Ketua Umum Museum Rekor - Dunia Indonesia (MURI)	Piagam Penghargaan	
3	2018	Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat	Partisipasi Mendukung Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		Manokwari, 12 Juli 2018	DRS. Untung Subagyo	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat	Piagam Penghargaan	
4	2018	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari	Kerjasama Dalam Melaksanakan Operasi SAR di Wilayah Provinsi Papua Barat		Manokwari, 28 Februari 2019	George Leo Mercy Randang, S.IP	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari	Piagam Penghargaan	
5	2018	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Provinsi Dengan Serapan Dekon Kegiatan Satker P2PTVZ Tertinggi Pada Tahun 2018		Jakarta, 25 Februari 2019	dr. Anung Sugihantono, M.Kes	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
6	2018	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Satker Terbaik ke-1 (339033), Tingkat Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 " Kategori Satker DK/TP "			Arif Wibawa	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat	Piagam Penghargaan	
7	2018	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Provinsi Dengan Pelaporan POPM Filariasis di Seluruh Kab/Kotanya Secara Cepat, Lengkap dengan Cakupan > 65%		Jakarta, 25 Februari 2019	dr. Anung Sugihantono, M.Kes	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
8	2018	Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2018		Jakarta, 23 Mei 2018	Joko Widodo	Presiden Republik Indonesia	Piala Penghargaan	
9	2018	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Penghargaan atas Keberhasilan Mencapai ≥ 95% Cakupan Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) Fase II Tahun 2018		Oktober 2018	Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, Sp.M(K).	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERIODE TAHUN 2017 - Agustus 2024**

NO	TAHUN PEROLEHAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	PRESTASI YANG DICAPAI	NOMOR KEPUTUSAN	WAKTU PENETAPAN	DITETAPKAN OLEH	JABATAN	BENTUK PENGHARGAAN	GAMBAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	2019	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Pemenang Lomba Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2019 sebagai Pemenang ke-2, e-Aspirasi Tahun 2019, Kategori Pengelola Website Tingkat Dinas Kesehatan Provinsi Regional Timur	Kep. Menkes RI Nomor : HK.01.07/Menkes/711/2019	Jakarta, 6 November 2018	Terawan Agus Putranto	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
11	2019	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Peserta POSTER Terbaik (Harapan 1) pada Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans dan Karantina Kesehatan Yang di Selenggarakan pada tanggal 18-21 September 2019		Bekasi, 20 September 2019	dr. Anung Sugihantono, M.Kes	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
12	2019	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Berhasil dalam Sub PIN (Pekan Imunisasi Nasional) Polio Tahun 2019, Putaran 1 dan 2 dengan Cakupan > 95%			dr. Anung Sugihantono, M.Kes	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
13	2020	Direktorat Jenderal Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Piagam Penghargaan Atas "Komitmen Univesal Health Coverage (UHC) Dengan Capaian 98% Tahun 2020"		November 2021	David Bangun, M. Eng, IPU ASEAN.	Direktur Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Piagam Penghargaan	
14	2021	Direktorat Jenderal Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Provinsi Dengan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Terbaik		Jakarta, 17 November 2021	dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO.	Direktur Jenderal Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI	Piagam Penghargaan	
15	2021	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Satker Peringkat Terbaik Pertama (339033), Satker yang Memiliki Wewenang DK/TP dengan Nilai IKPA Terbaik sebesar 90,53 Periode Semester I Tahun Anggaran 2021 Lingkup Kanwil Ditjen Perben Prov Pabar	KEP-060/WPB.33/2021	Manokwari, 25 Agustus 2021	Moch. Ali Hanafiah	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat	Piagam Penghargaan	
16	2022	Direktorat Jenderal Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Piagam Penghargaan Atas "Komitmen Univesal Health Coverage (UHC) Dengan Capaian 99,07% Tahun 2022"		Desember 2022	dr. Lily Kresnowati, M.Kes.	Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Piagam Penghargaan	
17	2022	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Capaian Dinas Kesehatan Provinsi Dalam Eliminasi Malaria Pertama Di Regional Papua - Papua Barat		DKI Jakarta, 31 Januari 2023	Dr. Dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
18	2023	Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023		Jakarta 14 Maret 2023	K.H. Ma'ruf Amin	Wakil Presiden Republik Indonesia	Piala Penghargaan	
19	2024	Kementerian kesehatan Republik Indonesia	Sertifikat eliminasi Malaria Pegunungan Arfak		10-Jun-24	Budi G sadikin	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERIODE TAHUN 2017 - Agustus 2024**

1 NO	2 TAHUN PEROLEHAN	3 LEMBAGA PENYELENGGARA			4 PRESTASI YANG DICAPAI	5 NOMOR KEPUTUSAN	6 WAKTU PENETAPAN	7 DITETAPKAN OLEH	8 JABATAN	9 BENTUK PENGHARGAAN	10 GAMBAR
20	2024	Kementerian Indonesia	Kesehatan	Republik	Juara 1 kejuaraan mikroskopis malaria tingkat nasional		10-Jun-24	Budi G sadikin	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	gam dan pialaPiala Pengharg	
21	2024	Kementerian Indonesia	Kesehatan	Republik	Poster terbaik dengan tema peran lintas sektor dalam penanggulangan TBC di Tempata khusus dalam pertemuan monve TBV nasioalan 2024	PM.01.01/C/1867/2024	09-Jul-24	dr yudhi Pramono Mars	PLT direktur jendral pencegahan dan pengendalian penyakit	Piagam Penghargaan	
22	2024	Kementrian Indonesia	Kesehatan	Republik	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards dengan Cakupan UHC Sebesar 100 %		8 Agustus 2024			Piagam Penghargaan	
23	2024	Kementrian Indonesia	Kesehatan	Republik	Pembina Terbaik Tingkat Provinsi Program Keamanan Pangan Olahan Siap Saji Tahun 2024	(Kep. Menkes RI Nomor : HK.01.07/Menkes/1885/2024)	Jakarta, 6 Desember 2024	Budi G sadikin	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	

Penyelenggara pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan kepada warga masyarakat dan melindungi dari berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap diri, hak mupun harta benda masyarakat.



Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
Jalan. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kompleks
Perkantoran Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari,
Kode Pos : 98315

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Provinsi Papua Barat

Jalan. Angkasa Mulyono, Kompleks Irman Jaya, Amban, Manokwari,
Kode Pos : 98312



<https://dinkes.papuabaratprov.go.id>



[dinkes_pabar](#)



[Humas_DinkesPB](#)



[Dinas Kesehatan Papua Barat](#)